

# 15 tahun

## Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di Indonesia

Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

© [2015] The World Bank – PNPM Support Facility, Jakarta, Indonesia

[www.pnpm-support.org](http://www.pnpm-support.org)

Penyusun: Ian Pollock, Anita Kendrick

Editor: Lily Hoo, Vinny Flaviana Hyunanda

Desain Grafis: Bobby Haryanto

PSF Office

Bursa Efek Jakarta

Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53

Jakarta Selatan 12190

Tel: (6221) 52993000

Fax: (6221) 52993111

# **15 Tahun Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di Indonesia**

**Program Pengembangan Kecamatan (PPK)  
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)**

## DAFTAR ISI

**1** Pengantar

**7** Ikhtisar Pustaka

**68** Indeks

**72** Glosarium

## IKHTISAR PUSTAKA

Sudah lebih lima belas tahun Indonesia merintis dan menjalankan berbagai proyek dan program pembangunan berbasis masyarakat (*community-driven development*, CDD). Mulai 1997, ketika Program Pengembangan Kecamatan (PPK) diujicobakan di 25 desa, Indonesia telah merintis rancangan, pengelolaan, dan perluasan proyek-proyek yang memberi masyarakat lebih banyak kendali atas perencanaan dan sumber daya yang membangun kota dan desanya. Tahun 2007, Pemerintah memutuskan untuk menjadikan PPK program nasional di seluruh Indonesia dan mengubah namanya menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), yang pada akhirnya menjangkau lebih dari 70,000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa upaya pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di Indonesia memasuki fase baru, dan karenanya kini adalah saat yang tepat untuk mengilas balik dan mendata kembali pembelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman Indonesia memulai program pemberdayaan masyarakat dan membawanya sampai ke skala nasional.

Ikhtisar pustaka ini mengumpulkan artikel, hasil evaluasi, studi, dan materi lainnya yang mencerminkan pengetahuan yang didapat dari lima belas tahun penelitian, yang meliputi pelbagai topik yang berkaitan dengan PPK dan PNPM Mandiri, termasuk desain dan manajemen program, partisipasi dan pemberdayaan, transparansi dan akuntabilitas, kredit mikro, hubungan dengan pemerintah dan organisasi masyarakat madani, serta efektivitas pendekatan pemberdayaan masyarakat di wilayah perkotaan dan di situasi pasca konflik. Sebagian besar materi yang tercakup di sini telah diterbitkan oleh Fasilitas Pendukung PNPM (PNPM Support Facility, PSF), suatu fasilitas dana amanah multi-donor yang dikelola Bank Dunia untuk Pemerintah Indonesia. Semua materi tersedia bebas untuk publik.

Karena penekanannya adalah pada pembelajaran, publikasi jenis tertentu, misalnya studi rona awal dan makalah strategi, tidak dimasukkan. Apabila tertarik untuk mengetahui lebih dari yang ada di daftar pustaka ini, silakan kunjungi <http://www.pnpm-support.org>, <http://www.psflibrary.org>, atau Khazanah Pengetahuan Terbuka (*Open Knowledge Repository*) Bank Dunia di <http://openknowledge.worldbank.org>.





Indonesia's PNPM Generasi Program  
Final Impact Evaluation  
June 2011

Opportunities and  
Approaches for Better  
Nutrition Outcomes  
through PNPM Generasi

PNPM PERDESAAN  
EVALUASI DAMPAK  
April 2012

PNPM Generasi Program  
Impact Evaluation  
January 2010

Village Capacity in  
Maintaining Infrastructure  
Evidence from Rural Indonesia  
Arya Gadhuh

PNPM PEDULI  
ONE  
YEAR  
ON  
INDEPENDENT REVIEW  
LESSONS LEARNED  
DECEMBER 2012

INFRASTRUKTUR  
PNPM MANIA  
LAPORAN EVALUASI  
LAPORAN AKHIR: TEMUAN

PNPM RURAL  
IMPACT EVALUATION  
2012

KAPASITAS DESA DALAM MEMELIHARA  
INFRASTRUKTUR:  
BUKTI DARI PEDESAAN INDONESIA  
(NOVEMBER 2013)

PNPM GENERASI:  
EVALUASI DAMPAK  
PENERAPAN PNPM GENERASI  
(JUNI 2011)

# IKHTISAR PUSTAKA



## EVALUATION OF THE VILLAGE FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM (BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMU GAMPONG, BKPG) DI PROVINSI ACEH

Disunting oleh PNPM Support Facility – Bank Dunia  
Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

Pemerintah Aceh menjalankan program PNPM versi lokal yang disebut *Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong*, atau BKPG, pada tahun 2009. Sampai 2012, BKPG telah menyalurkan lebih dari 1,5 trilyun rupiah (sekitar USD 120 juta) untuk mendukung investasi untuk infrastruktur desa, kelompok simpan pinjam untuk perempuan, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola desa, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Berbeda dengan PNPM nasional, BKPG memberikan jumlah bantuan langsung masyarakat yang sama untuk setiap desa di propinsi tersebut. Evaluasi ini mengkaji keseluruhan kinerja BKPG, pengetahuan masyarakat tentang program ini secara umum, dan persepsi publik tentang efektivitasnya. Temuan-temuan utamanya antara lain:

- 63% responden survei pernah mendengar tentang BKPG, hasilnya sesuai dengan temuan tentang pengetahuan masyarakat tentang PNPM di luar Aceh. Hampir separuhnya (49%) mengatakan mereka mendengar tentang program melalui lebih dari satu sumber, dan 25% melalui tiga atau lebih sumber. Cara paling lazim responden mendengar tentang program adalah melalui jejaring sosial, termasuk teman, keluarga dan tetangga (68% responden).
- Terdapat perbedaan pengetahuan signifikan antar gender tentang program: 51% responden perempuan pernah mendengar tentang BKPG, dibandingkan 76% responden laki-laki.
- Di antara yang mengatakan pernah menghadiri pertemuan BKPG, mayoritas besar (71%) menghadiri hanya satu atau dua pertemuan.
- 45% dari responden laki-laki menghadiri setidaknya satu pertemuan BKPG, dibandingkan 18% responden perempuan.
- 65% perempuan yang menghadiri pertemuan BKPG mengatakan mereka “hanya mendengarkan” dibandingkan 47% laki-laki.

Temuan-temuan ini menengarai bahwa banyak masyarakat desa berhadapan dengan ongkos peluang (*opportunity cost*), norma-norma sosial, atau faktor-faktor lain yang membatasi pelibatan mereka dengan proyek-proyek partisipatif. Penulis laporan menyarankan bahwa model plebisit dari seleksi proyek yang diajukan Olken (2010) mungkin merupakan cara yang layak untuk memperluas partisipasi. Tokoh masyarakat, yang dikatakan di sini sebagai sumber utama informasi tentang program masyarakat, harus ditargetkan untuk dilatih dalam penganggaran dan tata kelola yang tanggap. Penelitian lebih lanjut mungkin dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana tokoh masyarakat memutuskan untuk mengalokasikan dana dan merespon kebutuhan desa. Sebagaimana PNPM pada konteks yang lain, BKPG dipandang melayani kebutuhan umum, dan bukan kebutuhan kelompok miskin dan marjinal. Implementasi Undang-Undang Desa (UU Desa) yang baru dapat

### Lokasi Studi:

Aceh

### Metodologi:

Kuantitatif

### Bahasa:

Inggris, Indonesia

### Kata Kunci:

Jender, sosialisasi, partisipasi, perempuan kepala keluarga, plebisit



---

menarik manfaat dari berbagai program (seperti Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, PEKKA) yang secara spesifik menargetkan masyarakat tersebut, sambil tetap memperhatikan dinamika sosial dan ongkos peluang yang mencegah rumah tangga miskin dan yang berkepal keluarga perempuan berpartisipasi dalam program masyarakat.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7075>

**Versi Bahasa Inggris:**

*Evaluation of the Village Financial Assistance Program (Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong, BKPG) in Aceh Province*

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7076>

**Proyek:**

PNPM-Perdesaan

**Bahasa:**

Inggris, Indonesia

**Kata Kunci:**

Perencanaan partisipatif,  
UU Desa 2014,  
akuntabilitas, transparansi,  
representasi, manajemen  
keuangan

## MENGINTEGRASIKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT KE DALAM KEBIJAKAN: DARI PNPM MANDIRI MENJADI UU DESA

**Diedit oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)**

**Diterbitkan Oleh: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jakarta**

Dengan ditandatanganinya UU Desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau UU Desa) pada awal tahun 2014, Indonesia telah membawa prinsip-prinsip pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dari PNPM Mandiri (program) menjadi kebijakan. Laporan ini mengkaji kekuatan dan keterbatasan PNPM, serta menawarkan dan menjelaskan secara umum bagaimana mendukung — dan membatasi risiko pada — proses pengembangan kerangka kerja nyata UU Desa.

Meski UU Desa sudah sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat secara umum dan proses PNPM secara khusus, rincian implementasinya dipaparkan dalam Peraturan Pemerintah (PP), yang beberapa di antaranya saling bertentangan.

- UU Desa secara jelas menghendaki pengembangan partisipatif rencana tahunan dan jangka menengah desa. Namun PP Desa menekankan kepemimpinan kepala desa.
- Rumah tangga miskin tidak secara khusus disebut dalam petunjuk pelaksanaan.
- Pemerintah desa memiliki keleluasaan untuk menentukan organisasi “sah” mana untuk diajak bermitra, sebuah wewenang yang dapat melemahkan organisasi desa yang tidak memiliki dukungan negara yang jelas.
- UU Desa menyatakan bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi dari pemerintah desa tentang berbagai kegiatan. PP Desa hanya menyebutkan tanggung jawab Kepala Desa untuk menginformasikan warga tentang penerapan tata kelola secara tertulis dan melalui media yang mudah diakses. Tidak ada laporan menyeluruh pemerintah desa kepada warga tentang pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan anggaran.
- UU Desa menyebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan warga desa berdasarkan representasi wilayah, yang dipilih secara demokratis. PP Desa menyatakan bahwa mekanisme khusus untuk memilih anggota BPD diserahkan kepada kabupaten, dan tidak menyebutkan representasi wilayah.
- PP Desa memberikan akuntabilitas yang lebih lemah dibandingkan akuntabilitas di bawah PNPM atas transfer dana, sehingga memungkinkan aliran dana hanya dengan tanda tangan dari kepala desa dan bendahara.

---

Laporan ini merekomendasikan untuk fokus pada dampak tata kelola yang lebih baik terhadap kemiskinan. Sumber daya tambahan harus disediakan khusus untuk memastikan bahwa mekanisme tata kelola berjalan dengan baik di desa dan daerah termiskin. Untuk mencapai tujuan-tujuannya, perlu ada pemahaman dan penyesuaian pada ragam pelaksanaan UU Desa dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial yang berbeda, dan pelaksanaannya harus mencakup berbagai proses untuk pembelajaran dan penyesuaian yang terus menerus. Sebaiknya ada satu unit pusat yang memimpin dan mengkoordinasikan pengelolaan transisi dan implementasi UU Desa.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7094>

<http://www.tnp2k.go.id/id/download/mengintegrasikan-prinsip-pembangunan-berbasis-masyarakat-ke-dalam-kebijakan-dari-pnpm-mandiri-menjadi-uu-des/>

**Versi Bahasa Inggris:**

*Transitioning Community-Driven Development Projects into Policy: From PNPM Mandiri to the Village Law*

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7093>

<http://www.tnp2k.go.id/en/download/integrating-communitydriven-development-principles-into-policy-from-pnpm-mandiri-to-the-village-law/>

## EXPANDING AND DIVERSIFYING INDONESIA'S PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT, 2007-2012

Jonathan Friedman

Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

Studi kasus ini memetakan perluasan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Indonesia menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kasus ini menawarkan beberapa pelajaran penting tentang peningkatan program pembangunan berbasis masyarakat.

- Komponen pembelajaran di dalam program merupakan kunci keberhasilan PNPM: penelitian rona awal dan evaluasi dampak yang menyeluruh untuk menentukan efektivitas program yang dijalankan oleh PNPM Support Facility (PSF).
- Ketika studi-studi ini menemukan kekurangan dalam PNPM, PSF memiliki keleluasaan dan pendanaan untuk merancang dan menerapkan program rintisan yang inovatif untuk mengatasi kesenjangan yang ada.
- Studi-studi tersebut menciptakan peluang bagi lembaga pemerintah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat madani untuk membahas persoalan kebijakan yang lebih luas. Dengan cara itu, PSF menjadi wadah bagi pelaku pemerintah dan non-pemerintah untuk bertukar gagasan.
- Hambatan-hambatan utama peningkatan PNPM mencakup variasi regional (khususnya di Papua) dan persoalan manajemen pada tingkat nasional, di mana PNPM hanya ditangani oleh sejumlah kecil staf di Kementerian Dalam Negeri.
- PNPM diharapkan dapat memacu masyarakat untuk menuntut transparansi dan pelayanan yang lebih baik dari pemerintah setempat, namun dampak pengiring (*spillover effect*) ini tidak terjadi.

Makalah ini diakhiri dengan diskusi tentang integrasi nilai-nilai PNPM ke dalam undang-undang baru, terutama UU Desa tahun 2014.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7054>

<http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/01/23040388/expanding-diversifying-indonesias-program-community-empowerment-2007-2012>

<http://successfultsities.princeton.edu/publications/expanding-and-diversifying-indonesia%E2%80%99s-program-community-empowerment-2007-2012>



### Proyek:

PNPM Perdesaan, PNPM Peduli, PPK, PNPM Generasi, PNPM RESPEK

### Metodologi:

Kualitatif

### Bahasa:

Inggris

### Kata Kunci:

Dampak pengiring, LSM, manajemen, peningkatan (*scale up*)



## GENDER INCLUSION STRATEGIES IN PNPM

**Sippi Azarbaijani-Moghaddam**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

Sebagai program nasional, PNPM memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi hambatan bagi kesetaraan gender; tetapi besarnya skala PNPM ini juga menghambat program sehingga tidak selalu mampu menangkap berbagai perbedaan dalam tiap komunitas atau menjawab kebutuhan kelompok-kelompok tertentu. Laporan ini mengulas pendekatan taktis untuk membawa kesadaran gender ke dalam arus utama, agar PNPM dapat melayani perempuan dengan lebih baik.

Bidang yang membutuhkan perhatian mendesak adalah:

- Dinamika gender dalam proses pengambilan keputusan; Kesadaran gender di antara para staf rendah; Baru kurang dari seperempat staf pernah menerima pelatihan kesadaran gender, dan ini bukan merupakan bagian dari pelatihan tingkat nasional; Kebijakan langkah afirmatif PNPM memang diikuti, namun baru secara mekanis. Sejauh ini, PNPM belum dapat memberikan pengaruh kuat pada persoalan gender, atau membangun solidaritas di kalangan perempuan.
- Pembagian kerja berdasarkan gender, di mana kerja perempuan tidak kasat mata. Perempuan diundang ke pertemuan PNPM tidak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, namun untuk menerima perintah, terutama dalam pekerjaan yang oleh lelaki dianggap merendahkan atau membosankan. Perempuan pun seringkali diharapkan menyumbangkan tenaganya secara cuma-cuma.
- Meningkatkan peluang bagi perempuan untuk membangun, mengendalikan dan memiliki aset sendiri (sekali pun jika pada awalnya sedikit).

Laporan ini merekomendasikan agar PNPM mengumpulkan strategi nasional gender, melatih fasilitator dalam isu gender, dan memasukkan indikator-indikator gender ke dalam sistem informasi manajemen (MIS) nasional. Indikator-indikator ini harus mencakup dampak, serta proses — bukan hanya jumlah perempuan yang menghadiri pertemuan PNPM saja, tetapi juga apakah partisipasi dalam PNPM tersebut memberikan manfaat bagi para perempuan. Program pengasuhan anak PNPM akan memungkinkan perempuan meningkatkan produktivitas dan partisipasi mereka secara signifikan. Laporan ini juga merekomendasikan agar staf terlibat lebih aktif dengan kondisi sosial setempat, termasuk hukum adat.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7062>



### Proyek:

PNPM Perdesaan

### Lokasi Studi:

Nusa Tenggara Timur,  
Sulawesi Selatan, Sumatra  
Barat

### Metodologi:

Kualitatif

### Bahasa:

Inggris

### Kata Kunci:

Perempuan, partisipasi,  
pengarusutamaan,  
solidaritas, tindakan  
afirmatif

**Proyek:**

PNPM Perdesaan

**Lokasi Studi:**

Sampel seluruh Indonesia

**Metodologi:**

Kuantitatif

**Bahasa:**

Inggris, Indonesia

**Kata Kunci:**

Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, akses, layanan garis depan

## SENSUS INFRASTRUKTUR: LAPORAN TENTANG KESIAPAN SUPLAI INFRASTRUKTUR DI INDONESIA – CAPAIAN DAN KESENJANGAN YANG MASIH TERJADI

**PNPM Support Facility**

Diterbitkan Oleh: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan PNPM Support Facility, Jakarta

Sensus infrastruktur dasar desa, termasuk kesehatan dan pendidikan, dilakukan menggunakan Sensus Potensi Desa 2011 (PODES) secara nasional. Sensus ini memberikan informasi rinci tentang 166.506 fasilitas kesehatan dan 164.561 sekolah di seluruh Indonesia, menggunakan tujuh indikator dari tiga sisi: (i) ketersediaan dan aksesibilitas; (ii) keberadaan dan kualifikasi personel; dan (iii) karakteristik fisik fasilitas. Data masuk ke tingkat lebih dalam dari provinsi, sehingga memungkinkan analisis kabupaten dan kecamatan.

- Kesenjangan terbesar dalam ketersediaan ditemukan di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, serta daerah-daerah terpencil di Kalimantan dan Sulawesi.
- Terdapat variasi besar di dalam provinsi. Kesenjangan antara perkotaan-perdesaan substansial; dimana perkotaan memiliki lebih banyak infrastruktur dan layanan yang lebih baik dibandingkan perdesaan.
- Lebih dari 6 juta orang Indonesia tidak memiliki atau minim akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, dan 36 juta tidak memiliki akses terhadap pelayanan rawat inap rumah sakit.
- Lebih dari 9 juta tidak memiliki akses ke sekolah menengah pertama (SMP), dan 16,6 juta tidak memiliki fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD atau TK).

Studi ini merekomendasikan untuk menyebarluaskan informasi ini, sehingga pemerintah daerah dan kementerian dapat membuat perencanaan berdasarkan informasi tersebut, perencana pembangunan dapat lebih baik menentukan sasaran, dan masyarakat lebih mampu menuntut tanggung jawab dari pemimpin mereka. Sensus infrastruktur di masa depan juga perlu mencakup sekolah dan klinik swasta.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7058>

**Versi Bahasa Inggris:**

*Infrastructure Census: Report on Infrastructure Supply Readiness in Indonesia – Achievements and Remaining Gaps*

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6943>

## STUDI KELEMBAGAAN TINGKAT LOKAL KE-3: LAPORAN AKHIR

**Anna Wetterberg, Jon R. Jellema, Leni Dharmawan**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

Studi Kelembagaan Tingkat Lokal (*Local Level Institutions*, LLI) pertama yang dilakukan pada tahun 1996 memberikan bukti penting dan inspirasi bagi PPK. Studi lanjutan pada tahun 2000/2001 (LLI2) dan 2012 (LLI3) kembali ke wilayah studi yang sama di Jambi, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur, untuk melacak perubahan kapasitas lokal (didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah umum secara kolektif), mengidentifikasi kondisi yang berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan kapasitas, dan melacak dampak desentralisasi, demokratisasi, dan perluasan program partisipatif sejak tahun 2001. Studi baru ini menggabungkan versi terbaru dari instrumen penelitian kualitatif dan kuantitatif yang digunakan dalam LLI2. Beberapa temuan kunci diantaranya:

- Sekitar separuh dari desa yang diteliti mempertahankan kapasitas yang sama; sekitar sepertiganya memburuk, dan sekitar seperempatnya menjadi lebih baik.
- Penurunan dikaitkan dengan hilangnya sumber daya lingkungan, berkurangnya hubungan mutual, dan kepemimpinan yang tidak responsif.
- Kapasitas yang sudah kuat memperkuat diri sendiri, dan kapasitas yang lemah dapat (namun tidak selalu) mengarah pada kemerosotan lebih jauh.
- Pejabat reformis dan kekuatan eksternal seperti LSM sering berperan penting dalam peningkatan kapasitas, namun memperkuat kekuatan kepala desa yang “baik” saja tidak cukup.

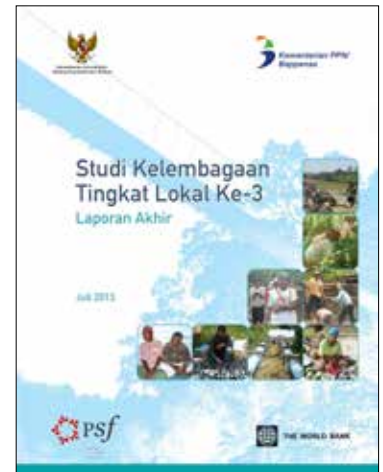
Laporan ini menyarankan agar para pembuat kebijakan merancang mekanisme baru untuk membuat pemerintah lebih tanggap terhadap warga, melalui arus informasi yang lebih baik dan akuntabilitas yang lebih tinggi, termasuk pemantauan, baik dari bawah maupun atas. Sekadar meningkatkan pendanaan dapat memperburuk konflik di desa berkapasitas rendah, dan apapun dana tambahan yang diberikan harus dipantau dengan hati-hati. Program-program pembangunan perlu mendorong pemberdayaan berbagai kelompok pemimpin pada tingkat masyarakat, memastikan agar berbagai suara didengar, dan agar kekuasaan tidak terkonsentrasi di tangan elit.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7053>

### Versi Bahasa Inggris:

*The Local Level Institutions Study 3: Overview Report*

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6942>



### Lokasi Studi:

Jambi, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur

### Metodologi:

Campuran

### Bahasa:

Inggris, Indonesia

### Kata Kunci:

Tindakan kolektif, kapasitas lokal, kelembagaan desa, tata kelola, LSM, organisasi masyarakat madani, kepala desa

**Proyek:**

PNPM Perdesaan

**Lokasi Studi:**

Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan

**Metodologi:**

Kualitatif

**Bahasa:**

Inggris, Indonesia

**Kata Kunci:**

LSM, layanan garis depan, pelaporan, OMS, perencanaan, fasilitator

## STUDI KUALITATIF PROLIFERASI DAN INTEGRASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Muhammad Syukri, Hastuti, Akhmadi, Kartawijaya, Asep Kurniawan**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

Pada tahun 2010, Presiden memerintahkan seluruh program pembangunan berbasis masyarakat untuk dilebur menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan menginstruksikan PNPM untuk berintegrasi dengan mekanisme perencanaan jangka menengah sampai jangka panjang yang ada, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Penelitian ini menanyakan seberapa baik proyek-proyek dan prosedur ini berintegrasi. Temuan menunjukkan bahwa:

- Integrasi yang mulus bertumpu pada dukungan di semua tingkatan: dari kepala desa yang berdedikasi, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan tokoh masyarakat pada tingkat akar rumput, sampai pemerintah daerah dan nasional. Dimana ada dukungan yang memadai, proyek dan program dapat diintegrasikan relatif mudah, namun dukungan tersebut pada umumnya kurang dalam praktiknya.
- Arus informasi yang lemah antara desa dan pemerintah membuat layanan garis depan yang dikelola pemerintah sangat sulit untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan desa.
- Integrasi saja tidak dapat membuat PNPM atau Musrenbangdes lebih inklusif. Inklusi penuh masih bergantung pada upaya para fasilitator, LSM, dan tokoh masyarakat.

Studi ini secara eksplisit merekomendasikan untuk mengaitkan semua program pembangunan ke Musrenbangdes, menciptakan sebuah sistem tunggal untuk penganggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi semua proyek, dan menggunakan organisasi masyarakat madani untuk memastikan bahwa pemerintah daerah merancang rencana kerja mereka dengan menanggapi kebutuhan masyarakat.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6995>

**Versi Bahasa Inggris:**

*Qualitative Study of the Proliferation and Integration of Community Empowerment Programs*

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6994>



## INDONESIAN VILLAGE HEALTH INSTITUTIONS: A DIAGNOSTIC

**Karrie McLaughlin**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

Penelitian ini melihat bagaimana para pelaku dan lembaga kesehatan tingkat desa berinteraksi (atau tidak berinteraksi) dengan anggota masyarakat dan dengan berbagai tingkatan pemerintah, dan melihat seberapa besar kekuatan dan tingkat kepercayaan yang mereka miliki. Studi ini juga mengkaji pendekatan dalam meningkatkan keterlibatan warga yang diambil oleh *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme* (ACCESS) dan *Australian-Indonesian Partnership on Maternal and Neo-natal Health* (AIPMNH). Terakhir, studi ini membahas penggunaan data. Temuan mencakup:

- Sektor kesehatan tampak enggan untuk mendengarkan pendapat siapa pun yang tidak memiliki latar belakang kesehatan, dan tidak sepenuhnya menelaah kendala akses seperti transportasi, informasi, dan komunikasi yang buruk, serta biaya di muka yang signifikan.
- Informasi kesehatan dikelola secara birokratis. Jika pos gizi di suatu kabupaten kosong, misalnya, tidak ada orang lain pada tingkat tersebut yang merasa berwenang atau wajib untuk menyediakan informasi tentang gizi.
- Bidan merupakan pintu masuk pertama bagi pelibatan warga desa dalam sistem kesehatan. Dukun beranak adalah sumber informasi kesehatan yang utama bagi sebagian besar perempuan — baik benar atau salah — dan di banyak tempat tidak ada fasilitas kesehatan lain yang dapat digunakan.
- Kebijakan saat ini yang tidak mengikutsertakan dukun beranak dari sistem kesehatan menutup kemungkinan untuk melibatkan mereka secara konstruktif, dan melemahkan jejaring dukungan di tingkat desa tanpa memberikan alternatif.
- Di setiap desa yang dikunjungi, posyandu beserta kader-kadernya merupakan titik kontak utama bagi para perempuan dalam sistem kesehatan formal.
- Tautan antara pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), bidan, dan petugas posyandu seringkali lemah, dan tautan dengan para pelaku “non-kesehatan” nyaris tidak ada.
- Hampir setiap program kesehatan mengumpulkan datanya sendiri, dikarenakan kurangnya kepercayaan pada sumber-sumber lain.
- Sanksi atas hasil yang buruk dapat mendorong beberapa individu untuk memalsukan data.

Studi ini merekomendasikan untuk melibatkan dukun beranak dan tabib (dukun berobat), menawarkan pelatihan kepada mereka serta dukungan dan mendengarkan mereka, bukan mengecualikan mereka dari sistem kesehatan. Hubungan harus diperkuat antara para pelaku di tingkat desa — bidan, posyandu, puskesmas, dan pemerintah desa — dan kepala desa harus dilatih dan didorong untuk terlibat dengan masalah kesehatan. Advokasi LSM perlu ditelusuri lebih lanjut. Beberapa bidang kebijakan yang bermasalah harus dibahas: diperlukan adanya pendekatan punitif terhadap pelayanan; biaya riil dari pendekatan berbasis fasilitas; dan layanan

Indonesian Village  
Health Institutions

### Proyek:

PNPM Generasi, ACCESS, AIPMNH

### Lokasi Studi:

Jawa Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat

### Metodologi:

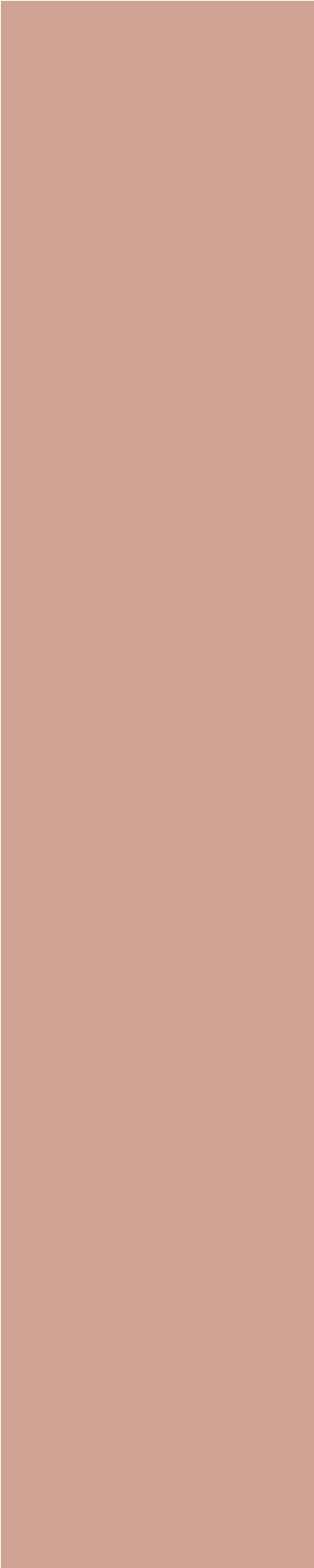
Kualitatif

### Bahasa:

Inggris

### Kata Kunci:

Data, informasi, posyandu, puskesmas, bidan, LSM, advokasi



---

darurat, dan lain sebagainya. Posisi PNPM Generasi dalam sektor kesehatan harus ditingkatkan, mungkin dengan menyewa tenaga ahli ‘fasilitator kesehatan’ sebagai menjadi penghubung di antara mereka dan membantu PNPM Generasi menggunakan data untuk melakukan advokasi isu-isu kesehatan. PNPM Generasi juga bisa dikoordinasikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), daripada divisi pemberdayaan masyarakat, yang akan menempatkannya pada posisi lintas sektoral yang lebih kuat.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7045>

## STUDI KELOMPOK MASYARAKAT PNPM

**Leni Dharmawan, Indriana Nugraheni, Ratih Dewayanti**

Diterbitkan Oleh: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jakarta

Studi ini mengkaji kelembagaan masyarakat yang didirikan PNPM: Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelolaan Keuangan (UPK), Badan Pengawas Unit Pengelolaan Keuangan (BP-UPK), dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam PNPM Perdesaan, serta Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam PNPM Perkotaan. Studi ini menanyakan apa yang lembaga-lembaga tersebut lakukan, status hukum mereka, dan jenis dukungan yang mereka butuhkan untuk berfungsi. Penelitian ini juga mencari contoh-contoh di mana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam PNPM telah berkembang melampaui batas-batas program dan ke dalam proses desa lain, termasuk pemerintah desa.

- Pengalaman masyarakat tentang PNPM, walau sejauh ini positif, belum berhasil mendorong masyarakat untuk menuntut lebih dari pemerintah.
- Di beberapa tempat, pelaksanaan PNPM didominasi oleh kepala desa dan elit desa tanpa dapat diintervensi oleh lembaga-lembaga yang didirikan untuk mencegah hal tersebut terjadi, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Kelemahan ini juga terjadi akibat beban pekerjaan administratif dan pelaporan yang harus dikerjakan para fasilitator, yang membuat mereka kewalahan.

Laporan ini merekomendasikan untuk menggunakan peraturan yang mengikat untuk memperluas prinsip-prinsip transparansi PNPM sampai ke pengelolaan anggaran desa. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini harus diukur dengan indikator kunci, dengan sanksi bagi pelanggar dan insentif bagi yang berkinerja tinggi. Harus ada mekanisme *checks and balances* di tingkat desa yang bersifat permanen dan bukan atas dasar proyek. Perlu dilakukannya fasilitasi sosial untuk memastikan bahwa anggaran desa tidak dikuasai oleh kalangan elit.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7050>

<http://www.tnp2k.go.id/id/download/studi-kelompok-masyarakat-pnpm/>



### Proyek:

PNPM Perdesaan

### Lokasi Studi:

Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Bangka-Belitung

### Metodologi: Kualitatif

### Bahasa:

Bahasa Indonesia

### Kata Kunci:

Fasilitator, kelembagaan desa, tata pemerintahan, BPD, dampak pengiring

**Proyek:**

PNPM Perkotaan

**Lokasi Studi:**

Sampel seluruh Indonesia

**Metodologi:**

Kualitatif

**Bahasa:**

Inggris, Indonesia

**Kata Kunci:**

Kemiskinan perkotaan, penargetan, fasilitator, representasi

## INDONESIA: EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT PERKOTAAN

### PNPM Support Facility

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility bekerjasama dengan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta

PNPM Perkotaan, sebuah program pembangunan berbasis masyarakat yang memberikan hibah langsung bagi masyarakat miskin perkotaan untuk pembangunan infrastruktur berskala kecil dan meningkatkan ekonomi dan sosial, saat ini melayani seluruh kawasan perkotaan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan tata kelola lokal, dan memberikan layanan kebutuhan dasar pada tingkat masyarakat. Tulisan ini mengacu pada dua studi lapangan yang sifatnya kualitatif dalam menilai bagaimana aspek-aspek spesifik program tersebut berfungsi, terutama untuk komponen infrastruktur, serta mendokumentasikan praktik baik dan pembelajaran yang didapat.

- Proyek-proyek PNPM Perkotaan dinilai telah dipilih dan ditargetkan dengan baik, dan penilaian independen menunjukkan bahwa infrastruktur yang dibangun melalui program ini berkualitas yang tinggi.
- Kelembagaan masyarakat dianggap bekerja relatif baik, mandiri dari program dan struktur Pemerintah.
- Kendala partisipasi yang paling sering disebut adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti seluruh proses dalam PNPM, yang bisa cukup signifikan.
- Anggota masyarakat dan informan utama menyebutkan bahwa layanan sosial dan ekonomi menjadi prioritas pertama mereka — bukan infrastruktur.
- Proyek yang lebih besar dan lebih kompleks membutuhkan manajemen keuangan yang kuat dan tenaga kerja terampil, sehingga lebih sulit untuk melibatkan anggota masyarakat (yang tidak terlatih) dalam pelaksanaannya.

Laporan ini merekomendasikan peningkatan pendanaan untuk kegiatan sosial dan ekonomi, antara lain sebagai cara untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Perlunya memberikan pelatihan bagi para fasilitator, serta pengurangan beban kerja administrasi, sehingga mereka dapat lebih fokus pada sisi pemberdayaan, inklusi, dan pengumpulan data yang lebih baik. PNPM Perkotaan juga perlu mengembangkan manual, dengan petunjuk tentang perencanaan pemeliharaan, berkoordinasi dengan pemerintah lokal, dan meningkatkan komunikasi antar kelompok PNPM di daerah sekitarnya.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6528>

### Versi Bahasa Inggris:

*Indonesia: Evaluation of the Urban Community Driven Development Program* <http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6527>

<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17870>



## INDONESIA: KEMISKINAN PERKOTAAN DAN ULASAN PROGRAM

### PNPM Support Facility

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta

Penelitian ini menggabungkan informasi dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2002-2010 dan Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI) dengan studi kualitatif kelompok miskin perkotaan di 16 lokasi. Tulisan ini membangun gambaran menyeluruh tentang kemiskinan perkotaan dengan fokus pada partisipasi dalam program bantuan sosial serta aksesibilitas dan penggunaan layanan dasar. Temuan utama meliputi:

- Persoalan utama yang disebut masyarakat miskin perkotaan: pendapatan rendah, minimnya lapangan kerja, dan biaya pendidikan yang tinggi. Infrastruktur yang buruk dan kurangnya modal juga disebut, namun pada skala prioritas yang lebih rendah.
- Program-program perlindungan sosial seperti Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjangkau banyak masyarakat miskin dan nyaris miskin perkotaan. Kebocoran dalam program-program ini cukup signifikan, namun tingkat kebocoran di daerah perkotaan jauh di bawah tingkat kebocoran di perdesaan.

Studi ini merekomendasikan fokus pada dua bidang kebijakan utama:

- Kebijakan ekonomi yang meningkatkan keuntungan ekonomi dari urbanisasi, termasuk investasi di bidang infrastruktur, memastikan bahwa pembangunan infrastruktur inklusif terhadap warga miskin dan mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat miskin serta memperluas akses terhadap kredit.
- Kebijakan sosial yang memperluas akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin perkotaan, melindungi rumah tangga miskin dari kehilangan pendapatan seketika, dan menyempurnakan rancangan serta penargetan program yang ada.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6530>

### Versi Bahasa Inggris:

*Indonesia: Urban Poverty and Program Review*

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6529>

<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16301>



### Proyek:

PNPM Perkotaan, BLT, Raskin, Jamkesmas

### Lokasi Studi:

Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan

### Metodologi:

Campuran

### Bahasa:

Inggris, Indonesia

### Kata Kunci:

Kemiskinan perkotaan, penargetan, perlindungan sosial, perencanaan kota

**Proyek:**

PNPM Generasi

**Lokasi Studi:**Jawa Barat, Jawa Timur,  
Nusa Tenggara Timur**Metodologi:**

Kualitatif

**Bahasa: Inggris, dengan  
ringkasan eksekutif  
dalam Bahasa Indonesia****Kata Kunci:**Bidan, asisten persalinan  
tradisional, pelayanan  
kesehatan, pelayanan garis  
depan, posyandu, *elite  
capture*, malnutrisi

## **OPPORTUNITIES AND APPROACHES FOR BETTER NUTRITION OUTCOMES THROUGH PNPM GENERASI**

**Jesse Hession Grayman, Nelti Anggraini, Siti Ruhanawati**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM Generasi) menggunakan dana hibah berinsentif untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menjamin akses universal terhadap pendidikan dasar, dan mengurangi kemiskinan. Evaluasi dampak menunjukkan bahwa PNPM Generasi efektif mengurangi gizi buruk, namun belum menyentuh mekanisme yang ada. Laporan ini menanyakan bagaimana indikator malnutrisi kronis naik dan turun, seberapa besar PNPM Generasi berpengaruh terhadap proses tersebut, dan sejauh mana PNPM Generasi telah mengubah perilaku pengguna dan penyedia layanan kesehatan. Temuan utama studi ini meliputi:

- PNPM Generasi menjangkau daerah-daerah terpencil dengan memanfaatkan posyandu dalam cara-cara baru. Melalui posyandu, bidan membantu menghubungkan masyarakat dengan layanan kesehatan dari pemerintah.
- Penyedia layanan kesehatan menjangkau masyarakat yang dianggap “pantas” untuk menerima layanan kesehatan, dan tidak kepada mereka yang dirasa “tidak pantas.”
- Sebagian besar dana PNPM Generasi dipergunakan untuk pemberian makanan tambahan yang menarik bagi orang tua dan anak-anak untuk datang ke posyandu setempat. Namun pemberian makanan tambahan ini sebenarnya tidak berdampak pada malnutrisi kronis.
- Baik penyedia maupun pengguna layanan kesehatan tidak benar-benar memahami cara kerja hibah berinsentif ini.
- Dalam PNPM Generasi, baik pengetahuan maupun sumber daya rentan terhadap dominasi dan perilaku *rent seeking*.

Laporan ini menyarankan untuk menetapkan batasan pada jumlah yang dapat dibelanjakan untuk pemberian makanan tambahan, sementara perlu meningkatkan kualitas makanan yang dibeli melalui kegiatan ini. PNPM Generasi harus berbuat lebih banyak untuk meningkatkan keterampilan para kader posyandu, dan menawarkan insentif yang lebih tinggi untuk para pekerja yang lebih terampil. PNPM Generasi juga harus memperluas kesempatan pelatihan kepada asisten persalinan tradisional (dukun beranak), dan mengikutsertakan mereka ke dalam sistem kesehatan resmi, bukannya mengecualikan mereka.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6922>

## EVALUASI HASIL: PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN MELALUI INVESTASI PNPM LINGKUNGAN MANDIRI PERDESAAN (PNPM GREEN) – ANALISIS PENGIDUPAN PEDESAAN

**Vivianti Rambe, Steffen Johnsen**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

PNPM *Green* dirancang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk mengelola lingkungan dan mendapat manfaat dari sumber daya alam mereka. PNPM *Green* beroperasi di delapan (8) provinsi, dan mendukung hanya empat jenis proyek, yaitu: pengelolaan sumber daya alam, kegiatan ekonomi produktif, energi terbarukan, dan peningkatan kapasitas, yang semuanya harus berkontribusi positif pada lingkungan. PNPM *Green* mendanai fasilitator tambahan untuk mengarusutamakan konsep keberlanjutan.

Laporan ini mengevaluasi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari PNPM *Green*, mengambil dari tiga studi berbeda: Kajian Ekonomi dan Mata Pencarian (oleh LPM Equator), Kajian *Micro-Hydropower – Return on Investment* (MHP-ROI) (oleh Castlerock), dan Kajian Efek *Spillover* (oleh CARDS-IPB). Beberapa temuan kunci dari evaluasi ini adalah:

- PNPM *Green* harus membantu melestarikan atau memperbaiki aset alam, tetapi manfaat tersebut baru akan muncul sepenuhnya dalam jangka panjang — misalnya, ketika sudah menjadi pohon bakau yang dewasa.
- Proyek mikrohidro tidak memadai untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi memiliki manfaat sosialnya cukup besar.
- Proyek penghidupan PNPM *Green* sering berhasil menciptakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau penghematan biaya yang layak dan berkelanjutan.

Ada kemungkinan meningkatnya partisipasi dalam PNPM *Green* jika proyek ini: (a) mengikuti prioritas mata pencaharian para pesertanya; (b) memberi manfaat langsung; (c) secara langsung meningkatkan pendapatan rumah tangga; (d) didukung oleh nilai-nilai lokal, peraturan lokal, atau pengetahuan lokal; dan (e) difasilitasi bersama oleh tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah setempat.

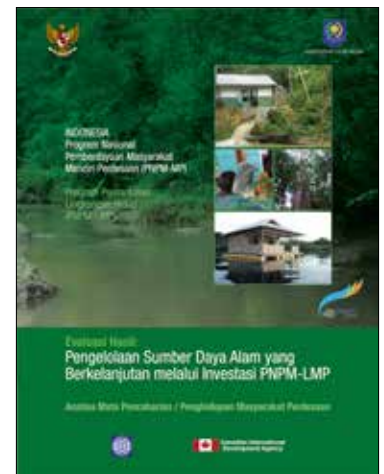
<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6816>

### Versi Bahasa Inggris:

*Results Evaluation: Sustainable Natural Resource Management Through PNPM Green Investments – A Rural Livelihood Analysis*

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6815>

<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21128>



### Proyek:

PNPM *Green* (PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan – PNPM LMP)

### Lokasi Studi:

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sumatra Utara

### Metodologi:

Campuran

### Bahasa:

Inggris, Indonesia

### Kata Kunci:

Keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam, penghidupan, fasilitator

## ***SHOULD AID REWARD PERFORMANCE?: EVIDENCE FROM A FIELD EXPERIMENT ON HEALTH AND EDUCATION IN INDONESIA (NBER WORKING PAPER NO. 17892)***

**Benjamin A. Olken, Junko Onishi, Susan Wong**

Diterbitkan Oleh: National Bureau of Economic Research, Cambridge

Makalah ini bertanya apakah insentif kinerja dalam PNPM Generasi benar-benar meningkatkan kinerja berbagai prakarsa kesehatan dan pendidikan. Dalam suatu uji acak terkontrol, 3.000 desa yang menerima hibah untuk kesehatan ibu dan anak serta pendidikan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok dengan insentif, kelompok tanpa insentif, dan kelompok kontrol murni. Survei dilakukan pada awal, kemudian pada 18 dan 30 bulan setelah program dimulai. Dengan lebih dari 1,8 juta penerima manfaat yang ditargetkan, ini adalah salah satu eksperimen sosial acak terbesar yang pernah dilakukan. Temuan meliputi:

- Dengan ataupun tanpa insentif, PNPM Generasi memiliki dampak positif yang signifikan secara statistik pada dua belas indikator kesehatan dan pendidikan, seperti pemeriksaan rutin berat badan untuk anak-anak, perawatan pra dan paska kelahiran, serta tingkat kehadiran di sekolah.
- Desa dengan insentif, mencapai sasaran kesehatan mereka secara lebih cepat. Dorongan ini sangat jelas terlihat di desa-desa tertinggal.
- Setelah 30 bulan perbedaan antara daerah dengan insentif dan tanpa insentif tidak lagi terlihat signifikan secara statistik. Hal ini bukan karena kelompok dengan insentif telah berhenti bekerja, namun karena kelompok-kelompok tanpa insentif berhasil mengejar.
- Selain penurunan tingkat malnutrisi pada 18 bulan pelaksanaan program, hasil kesehatan akhir tidak lebih baik, walaupun dengan insentif.
- Insentif tidak memberikan dampak khusus pada pendidikan.

Makalah ini menyarankan dua cara, bagaimana pemberian insentif mungkin dapat mempengaruhi hasil:

- Insentif menyebabkan peningkatan dalam jumlah bidan sebagai penyedia layanan perawatan preventif yang paling utama (misalnya perawatan prenatal, pemeriksaan berat badan rutin untuk anak-anak). Namun insentif tidak menghasilkan peningkatan pada jumlah guru. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa bidan dibayar sesuai dengan layanan yang mereka berikan (*fee-for-service*), sedangkan guru tidak mengalami hal serupa.
- Insentif mungkin telah mendorong penggunaan dana yang lebih efisien. Daerah-daerah dengan insentif mengalihkan dana pendidikan untuk biaya kesehatan; namun tidak terlihat adanya penurunan jumlah rumah tangga yang menerima pasokan untuk pendidikan, dan para pelajar justru cenderung lebih tinggi kemungkinannya untuk menerima beasiswa.

Realokasi anggaran ini sangat penting, menunjukkan bahwa insentif dapat bekerja lebih baik jika ditempatkan pada tingkatan pemerintah yang cukup tinggi yang memiliki fleksibilitas anggaran.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7063>

<http://www.nber.org/papers/w17892>

### **Proyek:**

PNPM Perdesaan, PNPM Generasi

### **Lokasi Studi:**

Sampel seluruh Indonesia

### **Metodologi:**

Kuantitatif

### **Bahasa:**

Inggris

### **Kata Kunci:**

Insentif, kesehatan, pendidikan, penganggaran, eksperimen acak terkontrol (RCT)



## CONSOLIDATED ASSESSMENT OF UPK REVOLVING LOAN FUNDS IN INDONESIA

Micro-Credit Ratings International Ltd (M-CRIL)

Diterbitkan Oleh: M-CRIL

Laporan ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Dana Pinjaman Bergulir (*Revolving Loan Funds/RLF*) yang melekat pada PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan, dan kapasitas dari unit pengelola keuangan setempat (UPK) untuk menjalankannya. Laporan ini menanyakan apakah UPK dapat terus beroperasi tanpa bantuan pemerintah, dan apa yang harus berubah agar UPK menjadi berkelanjutan.

- Hanya 28% dari RLF Perdesaan dan 9% RLF Perkotaan yang berkelanjutan.
- Sebagian besar pinjaman berada pada kisaran 1-1,5 juta rupiah.
- RLF telah menjangkau jumlah pemanfaat yang cukup besar, kira-kira 1,6 juta peminjam, di empat provinsi yang disurvei.
- RLF di daerah perdesaan melayani lebih banyak nasabah dibanding di perkotaan, kemungkinan karena di perkotaan terdapat lebih banyak alternatif penyedia kredit.
- Permasalahan paling penting yang dihadapi RLF adalah bahwa di sebagian besar lokasi, baik peminjam maupun tokoh masyarakat dalam komite yang mengelola keuangan, menyangka bahwa RLF memberikan hibah, bukan pinjaman.
- Sebagian besar lokasi mengalami persoalan keterampilan dan motivasi: sedikit staf yang tahu bagaimana melakukan audit, dan remunerasinya pun rendah, terutama untuk UPK perkotaan, memberi kesan seolah-olah pekerjaan ini merupakan kerja "sukarela" yang mengakibatkan rendahnya motivasi.
- Kualitas data yang dilaporkan bergantung pada pelatihan dan komitmen staf UPK, yang bervariasi antar unit.
- Bidang utama dari pengembangan kapasitas yang harus diatasi adalah manajemen pengembalian yang terlambat dan dalam bidang manajemen serta pengawasan kelompok yang luas.
- Audit menunjukkan bahwa UPK tidak selalu melaporkan data yang mereka miliki secara akurat.
- Data UPK menunjukkan bahwa walaupun laba sudah baik; namun laporan-laporan mereka mengabaikan segala jenis biaya, termasuk biaya swadaya, fasilitasi, pengeluaran keuangan, dan kerugian atas pinjaman yang akurat, khususnya biaya kerugian yang diakibatkan oleh korupsi.
- Petunjuk teknis PNPM Perdesaan memiliki daftar indikator kinerja, namun tampaknya tidak ada yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Laporan ini merekomendasikan untuk memisahkan RLF dari PNPM, dan mengalihkannya menjadi salah satu bentuk hukum alternatif, misalnya sebagai koperasi, badan usaha milik negara, atau bentuk organisasi lain di bawah hukum Indonesia. UPK yang paling baik harus segera diluncurkan sebagai lembaga keuangan independen, sementara tingkatan berikutnya perlu diberikan bantuan selama 6-12 bulan untuk menjadi mandiri — setelah terdaftar di bawah rerangka hukum yang baru. Sedangkan yang tingkat kinerjanya paling rendah harus segera ditutup dan sumber dayanya dialihkan. Semua peserta dalam RLF membutuhkan pelatihan dan tuntunan, pengawasan dalam pekerjaan (*on-the-job*) yang konsisten serta koreksi. Metode pelatihan saat ini, seperti ceramah, harus ditinjau kembali. UPK harus diselaraskan dengan praktik terbaik kredit mikro internasional, dimulai dengan penguatan aturan akuntansi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja UPK harus disederhanakan, dan staf dilatih untuk melacak indikator-indikator tersebut dengan akurat.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7067>



### Proyek:

Dana Pinjaman Bergulir  
PNPM Perdesaan

### Lokasi Studi:

Jawa Tengah, Yogyakarta,  
Sumatra Barat, Nusa  
Tenggara Timur

### Metodologi:

Kuantitatif

### Bahasa:

Inggris

### Kata Kunci:

Dana Pinjaman Bergulir,  
keberlanjutan, UPK,  
korupsi, manajemen  
keuangan

## GOVERNANCE REVIEW OF PNPM RURAL: COMMUNITY LEVEL ANALYSIS

**Andrea Woodhouse**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

GOVERNANCE REVIEW OF PNPM RURAL  
Community Level Analysis  
Final report  
Andrea Woodhouse  
22 January 2012

### Proyek:

PNPM Perdesaan

### Lokasi Studi:

Jawa Barat, Jawa Tengah,  
Jawa Timur, Sulawesi  
Selatan

### Metodologi:

Kualitatif

### Bahasa:

Inggris

### Kata Kunci:

Tata kelola, korupsi,  
pengawasan, akuntabilitas,  
arus informasi

Pada tahun 2006, Pemerintah mengumumkan akan memperluas cakupan PNPM untuk menjangkau seluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2009, PNPM telah berkembang hampir empat kali lipat. Seperti yang dapat diduga dari setiap pertumbuhan yang pesat, banyak elemen program — termasuk di dalamnya unsur manajemen, mekanisme pengawasan dan kepegawaian — mengalami hambatan dalam menjaga kinerjanya.

Sejak tahun 2009, kunjungan pengawasan program PNPM telah menemukan adanya peningkatan yang serius dalam kasus penggelapan dana dan korupsi, serta masalah yang terkait dengan kualitas fasilitasi, partisipasi, dan elemen penting lainnya pada tingkat masyarakat. Ulasan Tata Kelola ini membahas lingkup dan penyebab masalah-masalah di atas, dan juga bertujuan untuk menawarkan rekomendasi bagi perbaikan.

Laporan ini menemukan masalah tata kelola dalam beberapa kategori: partisipasi, transparansi, arus informasi, korupsi, marginalisasi, *elite capture*, dan akuntabilitas.

Seringkali masalah di lapangan disebabkan oleh persoalan pada tingkatan yang lebih tinggi:

- Campur tangan politik. Lembaga PNPM rentan dikuasai oleh pelaku politik, seperti anggota DPR atau camat, yang membajak proses atau mengarahkan manfaatnya untuk tujuan mereka sendiri.
- Sulitnya melakukan pengawasan menyeluruh dari pusat.. Ketika kemungkinan deteksi minim, fasilitator menghadapi tekanan untuk berkolusi.
- Maraknya pertumbuhan cabang-cabang PNPM dan program-program rintisan lainnya, hal ini mengakibatkan beban kerja administratif yang semakin berat bagi fasilitator, sehingga menghambat fungsi fasilitasi.

Beberapa masalah dibawah disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan program:

- Program ini berada di bawah tekanan kuat untuk mencairkan dana, sehingga pengawasan dan akuntabilitas terlihat menjadi tujuan sampingan.
- Para fasilitator menghadapi beban kerja yang tidak realistis: beban pelaporan yang meningkat, serta lingkup geografis yang terlalu luas atau terlalu banyaknya cakupan desa untuk dibina secara efektif.
- Pada skala ini, pengawasan yang efektif menjadi tidak mungkin.

Tinjauan ini merekomendasikan untuk fokus pada inti program, yaitu: fasilitator terampil yang leluasa dalam melakukan pekerjaan mereka, dengan mekanisme akuntabilitas yang dapat diandalkan. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri (PMD) perlu memperjelas visinya dan membangun kembali desain, implementasi, dan pengelolaan informasi program agar sejalan dengan visi tersebut. Untuk menekan korupsi, PNPM harus mengurangi jumlah transaksi tunai, melakukan lebih banyak audit silang, dan melibatkan organisasi masyarakat madani dalam pengawasan di tingkat kabupaten. PNPM juga harus menawarkan bantuan hukum, baik untuk penuntutan korupsi, maupun fasilitator yang terkena dampak dari kasus korupsi yang terjadi

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=5973>

## IMPROVING MANAGEMENT OF PNPM

### Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) dan PNPM Support Facility

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

Pada awal berdirinya tahun 1998, PPK memberi tugas pembuatan kebijakan, pendanaan, pemantauan, dan audit kepada pegawai negeri sipil, sementara fasilitasi teknis dan sosial dialihdayakan kepada sektor swasta. Melalui perubahan besar-besaran — termasuk desentralisasi dan mapannya institusi demokrasi Indonesia — pengaturan manajerial/administrasi untuk PPK, yang kemudian disebut sebagai PNPM, pada dasarnya sama. Tujuan studi ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sistem yang ada saat ini, dan untuk merekomendasikan perubahan yang akan mendukung transisi untuk PNPM yang lebih baik pada tahun 2014.

#### Kekuatan:

- Sekalipun dengan sumber daya PMD yang terbatas, misalnya jumlah staf yang tidak mencukupi dan belum terampil, program PPK maupun PNPM telah berfungsi dengan baik.
- Masyarakat sudah turut melibatkan diri dalam pemecahan masalah.
- Sistem yang ada mampu mengungkapkan pengaduan dan kasus-kasus korupsi.

#### Kelemahan:

- Tidak adanya sistem penganggaran secara elektronik, sehingga menyebabkan keterlambatan, penumpukan berkas-berkas, dan pemantauan yang tidak efisien. Jumlah pegawai yang ada di PMD terlalu sedikit untuk menangani PNPM dan semua program rintisannya secara tepat waktu.
- Beberapa institusi besar selain PMD, termasuk lembaga negara dan Bank Dunia, juga terlibat dalam pengawasan program, sehingga memiliki andil dalam penundaan perencanaan dan pelaksanaan yang dapat berpengaruh secara mendalam terhadap hasil program.
- Manajemen informasi yang buruk.
- Volume pengaduan melebihi dari apa yang dapat ditanggung oleh sistem dan pedoman untuk penyelesaian pengaduan tidak selalu jelas.

Laporan ini menyarankan untuk melakukan audit terhadap MIS yang digunakan saat ini dan merancang sistem informasi terpadu yang baru. Di tingkat nasional, manajemen sumber daya manusia perlu ditingkatkan, di mana pelaksana tugas semestinya memiliki keterampilan yang sesuai dengan tugasnya. PNPM harus mengembangkan sebuah sistem yang mampu menangani volume pengaduan yang diterima program. Sebagai tulang punggung PNPM, para fasilitator harus direkrut secara lebih baik, lebih terlatih, diberikan penilaian secara berkala, dan ditawarkan insentif untuk bekerja di daerah terpencil.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7065>



#### Proyek:

PNPM Perdesaan

#### Lokasi Studi:

Jawa Barat, Banten

#### Metodologi:

Kualitatif

#### Kata Kunci:

PMD, Kemendagri, penganggaran online, korupsi, penundaan, fasilitator, sumber daya manusia



## INDONESIA URBAN POVERTY ANALYSIS AND PROGRAM REVIEW

**Nicholas Burger, Peter Glick, Francisco Perez-Arce, Lila Rabinovich, Yashodhara Rana, Sinduja Srinivasan, Joanne Yoong**

Diterbitkan Oleh: RAND Labor and Population, ditugaskan oleh Bank Dunia melalui PNPM Support Facility, Jakarta

Selama delapan tahun sejak 2002 sampai 2010, tingkat kemiskinan di penjuru Indonesia menurun tajam, baik di perkotaan maupun di perdesaan; tetapi sejak tahun 2010, 33% dari penduduk kota (dan 48% dari penduduk Indonesia) memiliki pendapatan kurang dari USD 2 PPP (*purchasing power parity*/kekuatan daya beli) per harinya. 37% dari jumlah penduduk miskin Indonesia tinggal di kawasan perkotaan, proyeksi ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya urbanisasi.

Laporan ini menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI) untuk menganalisis kemiskinan perkotaan, serta menelusuri efektivitas dan penargetan program yang ditujukan untuk kaum miskin perkotaan. Laporan ini merupakan satu dari dua studi yang dilakukan oleh Bank Dunia, yang juga berkontribusi terhadap studi tinjauan PNPM Perkotaan yang lebih luas, yakni *Indonesia: Urban Poverty and Program Review*. Laporan studi tinjauan tersebut menemukan beberapa hal dibawah ini:

- Secara nasional, sejak tahun 2002, tingkat kemiskinan perkotaan telah menurun. Dan dari berbagai macam indikator, seperti pendaftaran sekolah sampai vaksinasi, menunjukkan hasil yang membaik.
- Sampel yang diambil dari wilayah perdesaan menunjukkan bahwa jumlah orang yang sama melintasi garis kemiskinan dalam kedua arah. Dalam sampel perkotaan, lebih banyak individu menjadi miskin daripada yang keluar dari kemiskinan. Tetapi proporsi penduduk miskin yang keluar dari kemiskinan masih lebih tinggi daripada proporsi nasional secara umum.
- Masyarakat miskin di daerah perkotaan lebih memprioritaskan lapangan kerja dan penghidupan daripada perbaikan infrastruktur.
- Persentase rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan sebenarnya sedikit lebih rendah di antara yang miskin daripada non-miskin.
- Secara keseluruhan, penargetan program kemiskinan lebih baik di perkotaan daripada di perdesaan, dan lebih baik di Jawa daripada di daerah lain. Namun di perkotaan sekalipun, 30% dari kuintil penduduk termiskin tidak mendapatkan beras bersubsidi dari program Raskin, dan 62% tidak memiliki kartu Jamkesmas.
- Tidak ada satupun karakteristik — seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, atau memiliki kepala rumah tangga perempuan — yang berkorelasi cukup kuat dengan kemiskinan untuk menuntun penargetan.

Laporan ini merekomendasikan standarisasi dan perbaikan praktik penargetan pada semua program. Lebih banyak perhatian perlu diberikan pada perlindungan sosial, untuk memastikan bahwa rumah tangga yang terkena guncangan tiba-tiba — penyakit, bencana, hilangnya pendapatan — tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6526>

### Proyek:

PNPM Perkotaan, BLT, Raskin, Jamkesmas

### Lokasi Studi:

Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan

### Metodologi:

Campuran

### Bahasa:

Inggris

### Kata Kunci:

Kemiskinan perkotaan, penargetan

## INFRASTRUKTUR PNPM MANDIRI PERDESAAN LAPORAN EVALUASI TEKNIS 2012: LAPORAN AKHIR TEMUAN DAN REKOMENDASI

**Neil Neate**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

Sebagian besar dana PNPM digunakan untuk membangun infrastruktur berskala kecil di perdesaan. Laporan ini mengajukan pertanyaan dasar tentang kualitas dan kegunaan infrastruktur tersebut, serta perencanaan dan manajemen di balik itu. Sebuah tim yang terdiri dari tujuh insinyur dan seorang arsitek, didampingi oleh spesialis sektor sosial, manajemen keuangan, dan pengaman (*safeguard*), melakukan evaluasi infrastruktur PNPM di dua belas provinsi, masing-masing dipilih secara seksama untuk memastikan lingkup geografis yang luas di seluruh Indonesia dan mencakup provinsi 'miskin' dan 'agak miskin'. Evaluasi tersebut menemukan bahwa:

- 82% dari proyek yang ditinjau berkualitas tinggi, 14% berkualitas cukup memadai, dan 4% dianggap gagal.
- Infrastruktur yang dibangun oleh Proyek PNPM rata-rata 15-25% lebih murah daripada proyek serupa yang didanai dan dikelola oleh kementerian sektoral pemerintah.
- Capaian atas semua indikator kurang lebih sama atau bahkan lebih baik daripada temuan pada evaluasi terakhir tahun 2007.
- Jumlah fasilitator teknis sama sekali tidak mencukupi. Tanpa bantuan mereka, proyek-proyek tertentu, terutama bendungan, dapat menjadi berbahaya.

Laporan ini menekankan bahwa sedikit kemungkinannya desa merencanakan pemeliharaan tanpa bimbingan dari fasilitator proyek. Fasilitator juga perlu memastikan bahwa masalah lahan telah diselesaikan dan didokumentasikan sebelum konstruksi apapun dimulai.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6775>

### Versi Bahasa Inggris:

*PNPM Mandiri Rural Infrastructure Technical Evaluation Report 2012 – Final Report: Findings and Recommendations* <http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6774>



### Proyek:

PNPM Perdesaan, PNPM Green, PNPM Generasi, BKPG, SPADA

### Lokasi Studi:

Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua.

### Metodologi:

Kuantitatif

### Bahasa:

Inggris, Indonesia

### Kata Kunci:

Pemeliharaan, infrastruktur perdesaan, fasilitator teknis, masalah pertanian

**Proyek:**

PNPM Perdesaan

**Lokasi Studi:**

Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan

**Metodologi:**

Kualitatif

**Bahasa:**

Inggris

**Kata Kunci:**

Perempuan, gender, inklusi, partisipasi

## ***PNPM GENDER STUDY 2012: INCREASING THE QUALITY OF WOMEN'S PARTICIPATION***

**Megan McGlynn Scanlon, Tasnim Yusuf, Ancilla Y. S. Irwan, Nelti Anggraini**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

Penelitian ekonomi mikro menunjukkan bahwa ketika perempuan berpartisipasi dalam kelembagaan dan proses di sekitar mereka, hasil menjadi lebih baik. Laporan ini menyelidiki peran perempuan dalam PNPM: keterlibatan mereka dalam semua tingkatan proses, status perempuan yang berpartisipasi, nasib proposal yang diajukan oleh perempuan, dan apakah proyek-proyek tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan perempuan yang dinyatakan. Laporan ini menemukan bahwa:

- Kualitas partisipasi beragam dan masih belum optimal. Perempuan jauh lebih aktif pada tahap awal — sosialisasi dan penilaian kebutuhan — daripada di tahap lanjutan, seperti perencanaan dan manajemen.
- Kurangnya pelatihan yang efektif tentang isu gender bagi para fasilitator, dan pedoman perekrutan kurang dapat menarik cukup banyak fasilitator perempuan.
- Ketika ditanya tentang prioritas mereka, perempuan cenderung menginginkan pelatihan. Namun di PNPM, proyek yang diajukan perempuan yang benar-benar didanai cenderung menyangkut infrastruktur, seperti sistem air.
- Strategi lokal untuk memasukkan gender sudah ada, namun belum dipadukan ke dalam praktik.

Laporan ini merekomendasikan untuk merekrut spesialis gender di tingkat nasional, dengan anggaran, kewenangan untuk mengumpulkan data tentang partisipasi perempuan dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan gender, serta sarana untuk berbagi pengetahuan. Jejaring fasilitator dengan fokus pada gender harus ditempatkan di kabupaten di seluruh negeri. Petunjuk teknis PNPM harus direvisi untuk memasukkan gender dalam pemetaan sosial, mengintegrasikan praktik-praktik baik yang diidentifikasi dalam penilaian PPK 2003, dan menyelenggarakan pertemuan khusus perempuan, tanpa kehadiran laki-laki. Pelatihan fasilitator harus mencakup kesadaran dasar tentang gender.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7066>

<http://bit.ly/1FzOale>



## PNPM PEDULI SATU TAHUN BERJALAN: EVALUASI INDEPENDEN ATAS HASIL PEMBELAJARAN (OKTOBER 2012)

**Donna Leigh Holden, Edwar Fitri, Meuthia Ganie-Rochman, Rima Irmayani, Early Dewi Nuriana**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

PNPM Peduli dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia atas dasar gagasan bahwa masih banyak orang atau kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan akses yang setara dengan kelompok masyarakat lainnya. Kelompok masyarakat marjinal ini biasanya menerima berbagai stigma dan stereotipe yang negatif karena perbedaan keadaan sosial, identitas, jenis pekerjaan ataupun orientasi seksual, contohnya kaum waria, perempuan pekerja seks komersial, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), masyarakat adat, anak-anak jalanan, buruh anak, dan sebagainya.

Berbagai penelitian internasional membuktikan bahwa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memiliki keuntungan komparatif dalam menjangkau kelompok-kelompok marjinal dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok ini untuk meningkatkan taraf hidup sosial dan ekonominya. PNPM Peduli bermitra dengan 72 OMS yang berkerja di tingkat nasional dan daerah dengan cara menyalurkan dana hibah untuk melaksanakan berbagai sub-proyek dengan masyarakat marjinal. Selain dana hibah, program PNPM Peduli juga memberikan dukungan kapasitas terkait advokasi, kegiatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta berbagai jenis kegiatan pengentasan kemiskinan yang inovatif. Melalui dana sub-hibah PNPM Peduli, OMS Indonesia dan kelompok marjinal bersama sama mengembangkan potensi lokal lewat kegiatan penghidupan, memberikan akses atas layanan kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial, serta advokasi untuk pemenuhan hak-hak dasar.

Ulasan dari penelitian ini memaparkan beberapa pembelajaran kunci yang dapat ditarik dari pelaksanaan program PNPM Peduli tahun pertama, adalah sebagai berikut:

- Program PNPM Peduli telah membangun relasi dan sistem yang akan menunjang perkembangan yang sedang berjalan, serta pengertian akan pendekatan yang efektif dalam menjangkau dan memberdayakan kelompok marjinal di Indonesia pada masa yang akan datang
- Meskipun logika program tampak solid dan tujuannya relevan, untuk memperbaiki pencapaian tujuan program (*Program Development Objective*, PDO) diperlukan adanya pentargetan atau fokus yang lebih baik terhadap isu, sasaran geografis, atau kelompok sasaran.
- Selama pelaksanaan, terlihat munculnya hasil terkait inklusi sosial. Di beberapa kasus, penerima manfaat mengapresiasi perubahan yang terjadi, khususnya peningkatan kesadaran, kepercayaan diri, jaringan sosial dan daya tawar.



### Proyek:

PNPM Peduli

### Lokasi Studi:

Jawa Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Yogyakarta, Sulawesi Selatan

### Metodologi:

Kualitatif

### Bahasa:

Inggris, Indonesia

### Kata Kunci:

OMS, penghidupan, kelompok marjinal

---

Adapun rekomendasi dari tinjauan ini menggarisbawahi beberapa hal penting dibawah ini:

- Agar PNPM Peduli dan mitranya dapat memfokuskan usaha mereka secara lebih efektif, dibutuhkan adanya visi yang menjelaskan tentang PNPM Peduli dan apa saja yang dibutuhkan.
- Kemitraan dalam PNPM Peduli harus berawal dari pengalaman yang sudah ada dan kapasitas dari organisasi yang sudah dikenal dengan menggunakan pendekatan yang sudah terbukti.
- Hasil di tingkat program tidak tercapai karena komponen program yang tidak terhubung dan proyek yang tersebar. Untuk menangani isu marginalisasi, PNPM Peduli dan organisasi mitra harus mengarah kepada pendekatan secara programatik.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7061>

**Versi Bahasa Inggris:**

*PNPM Peduli – One Year On: Independent Review of Lessons Learned* <http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6629>

## EVALUASI DAMPAK PNPM PERDESAAN

**John Voss**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

Makalah ini mengukur dampak PNPM Perdesaan terhadap kesejahteraan rumah tangga, kemiskinan, akses pada layanan, lapangan kerja, dinamika sosial, dan tata kelola. Pertanyaan survei meliputi konsumsi rumah tangga, kondisi perumahan, perawatan kesehatan, perawatan pra-kelahiran, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dinamika sosial, dan tata kelola. Laporan ini juga mengacu pada survey sosial dan ekonomi nasional (SUSENAS) tentang topik seperti besaran lahan, pasokan air, dan infrastruktur yang tersedia. Temuan utama meliputi:

- PNPM mengakibatkan konsumsi riil per kapita yang lebih tinggi, kemungkinan untuk keluar dari kemiskinan yang lebih tinggi, akses pada layanan kesehatan rawat jalan, dan peluang kerja yang lebih baik.
- Rumah tangga kelompok tertinggal (*disadvantaged*) atau marjinal (biasanya memiliki kepala keluarga perempuan atau berpendidikan rendah) tidak mendapatkan manfaat sebesar kelompok lainnya.
- PNPM dinilai memiliki modal sosial dan tata kelola yang baik di dalam program itu sendiri, namun manfaat ini tidak meluas ke proses pengambilan keputusan lainnya yang ada di desa.
- Dampak terkuat ditemukan di daerah dengan tingkat kesenjangan infrastruktur yang signifikan, di mana baik kelompok miskin maupun tidak, memiliki kepentingan yang sejalan.

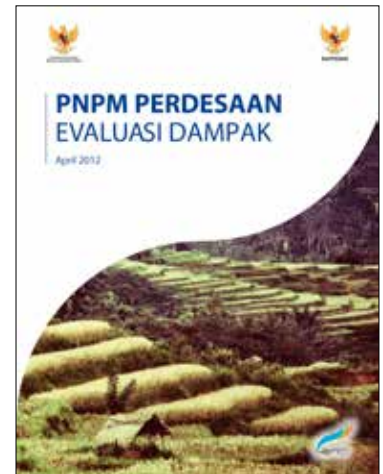
Laporan ini merekomendasikan agar hibah ditargetkan untuk daerah-daerah dengan tingkat infrastruktur yang rendah. Para fasilitator harus menekankan pada pemeliharaan dan keberlanjutan, serta terus mencoba pendekatan inovatif untuk mengikutsertakan kelompok-kelompok marjinal ke dalam proses PNPM. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk memahami mengapa mekanisme tata kelola PNPM ini belum dapat mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi lebih besar dan menuntut transparansi dari pemerintah.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6876>

### Versi Bahasa Inggris:

*PNPM Rural Impact Evaluation*

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6299>



### Proyek:

PNPM Perdesaan

### Lokasi Studi:

Sampel seluruh Indonesia

### Metodologi:

Kuantitatif

### Bahasa:

Inggris, Indonesia

### Kata Kunci:

Kemiskinan, infrastruktur perdesaan, pemerintahan, kelompok marjinal

**Proyek:**

PNPM Perkotaan

**Lokasi Studi:**

Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara

**Metodologi:**

Kualitatif

**Bahasa:**

Inggris

**Kata Kunci:**

Kemiskinan perkotaan, perencanaan tata ruang, infrastruktur perkotaan

## ***RAPID APPRAISAL OF PNPM NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT (AND POVERTY ALLEVIATION PARTNERSHIP GRANT MECHANISM)***

**Nina Schuler, Risye Dwiyan**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

Rintisan Pengembangan Lingkungan Pemukiman (*Neighborhood Development*) PNPM Perkotaan secara signifikan meningkatkan besaran hibah PNPM Perkotaan, dan memperkenalkan beberapa komponen baru, yaitu: perencanaan tata ruang dan prioritas kawasan. Kajian singkat ini dirancang untuk menampilkan sebuah gambaran pada saat tertentu dalam proses tersebut. Temuan menunjukkan bahwa:

- Proyek ini bekerja paling baik pada lokasi yang memiliki Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), pemerintah lokal yang peduli, dan kebutuhan infrastruktur yang sederhana.
- Rencana strategis tata ruang terlalu kompleks: kurang membantu masyarakat dalam memahami lingkungan mereka atau melakukan advokasi dengan pemerintah setempat.
- Rencana tata ruang cepat menjadi usang.
- Dikarenakan kendala waktu dan fasilitasi, banyak rencana Pengembangan Lingkungan yang sebelumnya diusulkan ditinggalkan sebelum pelaksanaannya.
- Pemerintah acap kali tidak memiliki fleksibilitas anggaran untuk memenuhi permintaan infrastruktur dari kelurahan.
- Tokoh masyarakat, fasilitator dan konsultan PNPM sering beranggapan bahwa masyarakat miskin berakar dalam perilaku yang “kumuh”.
- Fasilitator menginginkan lebih banyak bimbingan tentang makna “perbaikan permukiman kumuh,” serta pilihan program yang dibatasi (misalnya pengerasan jalan, sanitasi, pengelolaan sampah, air, perbaikan perumahan, perbaikan pasar) agar usulan masyarakat lebih terfokus.

Laporan ini merekomendasikan untuk menyederhanakan perangkat desain, dan membatasi pilihan proyek yang akan didanai PNPM ND (*Neighborhood Development*), atau melakukan seleksi proposal yang lebih ketat. Program ini membutuhkan metode yang lebih baik untuk mengidentifikasi masyarakat sasaran, mungkin fokus pada kabupaten dengan kepadatan kaum miskin perkotaan yang tinggi, atau yang secara khusus lebih rentan terhadap bencana alam. Program membutuhkan pemantauan yang lebih baik untuk memastikan agar tidak terjadi duplikasi kegiatan/program, atau malah mengurangi pengeluaran pemerintah (karena dianggap sudah dipenuhi lewat program), serta pelaporan yang lebih baik, sehingga pembelajaran dapat digunakan untuk memperbaiki program.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7069>

## LAPORAN PENELITIAN STUDI KUALITATIF DAMPAK PNPM PERDESAAN: JAWA TIMUR, SUMATERA BARAT, SULAWESI TENGGARA

**Muhammad Syukri, Sulton Mawardi, Akhmadi**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

Laporan ini membandingkan data kualitatif dari tahun 2012 dengan studi rona awal (*baseline*) yang dilakukan pada tahun 2007. Topik utama penelitian ini mencakup proses PNPM Perdesaan, termasuk partisipasi, transparansi, dan hubungan dengan pemerintah daerah; dinamika kemiskinan di tingkat perdesaan; serta akses atas layanan publik, dan kualitas dari layanan tersebut. Temuan utama termasuk:

- Walaupun tingkat partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi ditemukan kuat dalam PNPM, namun hal tersebut belum cukup untuk mendorong masyarakat untuk menuntut pemerintah desanya atas tiga hal diatas.
- Fitur adanya "pilihan terbuka" (*open menu*) hampir selalu direalisasikan dalam bentuk proyek infrastruktur, yang tidak selalu cocok dengan kebutuhan warga termiskin.
- Walaupun tingkat partisipasi tinggi, tetapi berkualitas rendah dan hanya bersifat "instrumental" saja. Tingkat partisipasi perempuan tinggi, namun tidak mengurangi dominasi laki-laki dalam proses.
- Sistem perwakilan (representasi) tidak selalu dapat menyuarakan aspirasi dari bawah (masyarakat ke pemerintah), ataupun menyalurkan informasi dari atas (pemerintah ke masyarakat).
- Di beberapa daerah, tingkat kemiskinan meningkat, yakni di daerah yang produktivitasnya rusak akibat pencemaran lingkungan, serta di mana mekanisasi industri telah mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja.
- Program tertarget seperti bantuan langsung tunai (BLT), Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), banyak berkontribusi dalam mencegah masyarakat miskin agar tidak jatuh semakin miskin. Tetapi, penentuan target dilakukan oleh kalangan elit, tanpa partisipasi ataupun transparansi.
- Ketimbang memberikan dana untuk proposal yang baik dalam proses yang kompetitif, desa-desa lebih memilih untuk membagi-bagikan dana secara merata di antara semua kelompok yang bersaing.

Laporan ini diakhiri dengan menekankan pentingnya fasilitator: untuk mensosialisasikan program dan pilihan terbuka, untuk mengadaptasi proses program sesuai dengan kondisi lokal, serta untuk membuat PNPM lebih inklusif demi memastikan bahwa prioritas masyarakat miskin dapat terpenuhi. Untuk mencapai tujuan ini, perlunya merekrut lebih banyak fasilitator yang kompeten, serta mengurangi beban kerja administrasi mereka. Fasilitator pun harus diawasi oleh sebuah badan yang berwenang untuk memastikan bahwa prosedur PNPM telah diikuti dengan benar. Di samping itu, PNPM harus mempertimbangkan untuk menargetkan pada kegiatan pertanian, mungkin melalui perubahan dalam rancangan program.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6877>

### Versi Bahasa Inggris:

*The Impact of PNPM Rural: East Java – West Sumatra – Southeast Sulawesi* <http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6552>



### Proyek:

PNPM Perdesaan

### Lokasi Studi:

Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Tenggara

### Metodologi:

Kualitatif

### Bahasa:

Inggris, Indonesia

### Kata Kunci:

Dampak, kemiskinan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas

## LAPORAN FINAL EVALUASI PNPM-RESPEK: INFRASTRUKTUR PEDESAAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

**Yulia Indrawati Sari, Harmein Rahman, Dewi Ratna Sjari Manaf**

Diterbitkan Oleh: AKATIGA untuk PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta



### Proyek:

PNPM RESPEK

### Lokasi Studi:

Papua, Papua Barat

### Metodologi:

Campuran

### Bahasa:

Inggris

### Kata Kunci:

Infrastruktur desa, partisipasi, *elite capture*, fasilitator, pemanfaatan, pengawasan masyarakat

Studi ini mengevaluasi pelaksanaan PNPM-RESPEK, program yang didukung oleh PNPM dan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat. PNPM-RESPEK dimulai pada tahun 2008, dan saat studi ini dilaksanakan telah menjangkau 87% desa di wilayah Papua dan Papua Barat. 70 persen dari dana PNPM-RESPEK digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Studi ini juga mencermati kualitas proyek dalam PNPM-RESPEK: apakah proyek-proyek tersebut berjalan, bagaimana proyek digunakan, dan apa dampaknya terhadap desa-desa pelaksana. Beberapa temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Infrastruktur yang dibangun melalui RESPEK lebih murah (sekitar 60%) daripada proyek serupa yang dibangun oleh kontraktor.
- Partisipasi umum sangatlah lemah, dan sebagian besar warga masyarakat tidak tahu tentang program. Masyarakat yang sangat miskin tidak diundang atau tidak diberitahu tentang adanya pertemuan, dan partisipasi mereka umumnya hanya pro-forma atau bahkan tidak ada. Satu-satunya bentuk kontribusi warga miskin adalah berupa tenaga.
- Sebagian besar infrastruktur yang dibangun hanya digunakan oleh masyarakat segmen atas saja, bukan oleh masyarakat luas. Pemanfaatan infrastruktur RESPEK yang kurang ini diakibatkan oleh dominasi elit (*elite capture*) selama proses perencanaan yang terjadi akibat dari fasilitasi yang lemah. Hanya sekitar sepertiga dari infrastruktur yang dibangun program RESPEK dinilai berkualitas baik dan digunakan secara efektif.
- Fasilitator sering diwajibkan mencakup wilayah yang luas dan mengunjungi desa-desa yang nyaris tidak dapat diakses sehingga mempengaruhi kualitas fasilitasi.
- Pemantauan oleh masyarakat biasanya terjadi ketika sebuah desa memiliki lebih dari satu suku yang berkuasa/dominan.

Laporan ini merekomendasikan perlunya upaya serius jangka panjang untuk merekrut dan melatih fasilitator daerah, mungkin serupa dengan program "*barefoot engineers*" (kader teknis) Bank Dunia. RESPEK harus merancang skema insentif bagi fasilitator untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, mencegah dominasi elit, dan dapat berkomunikasi secara efektif. Karena fasilitator tidak dapat terlalu sering berkunjung, masyarakat di daerah terpencil seharusnya diizinkan untuk menggabungkan anggaran untuk dua tahun ke dalam siklus proyek tunggal dua tahunan. Fasilitator pun harus fokus pada kelompok-kelompok tertentu, seperti ibu atau anak-anak, untuk menciptakan ruang bagi proyek-proyek non-elit.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6297>

### Versi Bahasa Inggris:

*Evaluation of PNPM RESPEK: Village Infrastructure and Institutional Capacity* <http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6298>



## LESSONS LEARNED FROM SPADA PLANNING AND SERVICE DELIVERY

**The PATTIRO Institute**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) (*Support for Poor and Disadvantaged Areas*, SPADA) adalah pelengkap dari PNPM di daerah tertinggal dan daerah berkonflik, dengan fokus khusus pada tata kelola di tingkat masyarakat dan kabupaten. SPADA dirancang untuk menggabungkan perencanaan partisipatif dan teknokratik, menyelaraskan rencana lokal dengan rencana kabupaten, serta memberikan pelatihan kepada pejabat pemerintah. Laporan ini menarik beberapa pelajaran dari pelaksanaan SPADA:

- SPADA telah meningkatkan pelayanan dasar, terutama dengan mendanai kegiatan yang tidak tercakup dalam anggaran kabupaten, yaitu: proyek pemerintah maupun proyek kelompok masyarakat yang tidak didanai, dan proyek-proyek yang tidak diusulkan oleh pemerintah maupun masyarakat, tetapi disarankan atas dasar penelitian atau proses penggalian gagasan (*brainstorming*).
- Perencanaan tingkat kabupaten tunduk pada “campur tangan” pemerintah, yang kemungkinan dikarenakan oleh kurangnya pengawasan dari masyarakat.
- DPRD merupakan mata rantai yang rentan. Anggota DPRD menginginkan lebih banyak kendali untuk mengintegrasikan semua anggaran negara di bawah pengawasannya sendiri. tetapi belum pernah terlibat dalam kegiatan kementerian sektoral sebelumnya. Disamping itu, pada umumnya anggota DPRD kurang memiliki pengetahuan tentang anggaran dan kegiatan kementerian di daerah mereka.

Laporan ini merekomendasikan untuk menempatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai koordinator utama dari seluruh proyek penanggulangan kemiskinan, dan berhubungan dengan DPRD untuk melakukan penyelarasan dan pemantauan program-program pembangunan.

\http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7060



### Proyek:

SPADA (P2DTK)

### Lokasi Studi:

Aceh, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur

### Metodologi:

Kualitatif

### Bahasa:

Inggris

### Kata Kunci:

Perencanaan, DPRD, APBN, pelayanan, korupsi



**Proyek:**  
P3BM

**Lokasi Studi:**  
Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah

**Metodologi:**  
Kualitatif

**Bahasa:**  
Bahasa Indonesia, dengan Ringkasan Eksekutif dalam bahasa Inggris

**Kata Kunci:**  
Tujuan Pembangunan Milenium (MDG), standar pelayanan minimum, pemetaan kemiskinan, perencanaan, penganggaran, *pro-poor*, database, penargetan

## STUDI PEMBELAJARAN DAN PEMANFAATAN PRO-POOR PLANNING, BUDGETING AND MONITORING (P3BM) KAJIAN SINGKAT DI SEMBILAN KABUPATEN

**Donny Setiawan, Suhirman**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

*Pro Poor, Planning, Budgeting and Monitoring-Evaluation* (P3BM), dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang terdiri dari empat bagian, yaitu: 1) lembar penilaian MDG, 2) pemetaan kemiskinan, 3) pemeriksaan APBD untuk melihat apakah sudah berpihak pada warga miskin, dan 4) instrumen untuk membantu pemerintah daerah dalam memilih proyek kecamatan yang paling dibutuhkan. P3BM mendaftarkan kabupaten yang ikut serta, melatih para pelatih yang akan turun ke tingkat kabupaten, serta memberikan bantuan teknis tentang perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada warga miskin. Kajian cepat ini dilakukan oleh PNPM *Support Facility* untuk memeriksa manfaat program, kelemahan dalam pelaksanaannya, serta pembelajaran yang dapat ditawarkan kepada PNPM dan program penanggulangan kemiskinan lainnya.

- Dengan kepemimpinan yang berkomitmen di tingkat kabupaten, program P3BM dapat membantu menargetkan perencanaan pembangunan dan anggaran pada masyarakat miskin dan menetapkan anggaran dengan benar.
- P3BM membutuhkan banyak upaya dalam pelaksanaannya, namun pegawai sering dimutasi serta kurang memiliki insentif untuk mengadopsi program dengan benar.
- Beberapa kabupaten terus menghadapi masalah teknis terkait *database* sehingga membutuhkan bantuan terus-menerus.
- OMS telah membantu mengembangkan dan menggunakan alat-alat ini.

Laporan ini merekomendasikan dibentuknya kerangka regulasi untuk mendukung program ini. Dapat diawali dengan Surat Edaran Bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan agar P3BM dapat bekerja dengan benar. Sebuah sekretariat khusus harus dibentuk pada setiap provinsi untuk menggerakkan kabupaten dalam upayanya menuju pencapaian MDG. Di tingkat lokal, perlu ditetapkan jabatan yang bertugas menyampaikan informasi P3BM kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), DPRD, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Program ini perlu juga memberikan bantuan teknis secara intensif untuk tingkat kabupaten selama dua tahun, dan memperluas pelatihan ke institusi perguruan tinggi, OMS, dan berbagai pemangku kepentingan PNPM.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7077>

### Versi Bahasa Inggris:

*Executive Summary Lessons Learned from the Pro-Poor Planning, Budgeting and Monitoring Program (P3BM): A Rapid Assessment in Nine Districts*

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7070>

## PEMBELAJARAN DARI PROGRAM P2SPP/PNPM INTEGRASI DI ENAM KABUPATEN (*P2SPP/PNPM INTEGRATION LESSONS LEARNED STUDY IN SIX DISTRICTS*)

**Penulis: Suhirman, Rianingsih Djohani**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

P2SPP (Program Pembangunan Sistem Perencanaan Partisipatif, yang kemudian berganti nama menjadi PNPM Integrasi pada tahun 2006) dirancang untuk membantu mengintegrasikan perencanaan masyarakat ke dalam sebuah skema perencanaan pemerintah teknokratis yang lebih besar. Program ini memberikan hibah pada tingkat kabupaten untuk mendanai proyek-proyek di tingkat kecamatan yang telah diusulkan dalam pertemuan PNPM di tingkat desa, menghubungkan 3 tingkatan daerah ini; kabupaten, kecamatan dan desa secara bersama-sama. Studi ini mengkaji interaksi antara proses perencanaan partisipatif PNPM dengan rencana-rencana yang dikembangkan oleh kementerian. Beberapa temuan dari studi ini adalah sebagai berikut:

- Usulan masyarakat sampai ke perencana di tingkat kabupaten. Namun tidak ditemukan banyak bukti bahwa perencanaan pemerintah benar-benar menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Perencanaan menjadi terpecah-pecah. Baik secara horizontal, antar desa saling tidak mengetahui kegiatan apa yang dilaksanakan; maupun vertikal, desa tidak mengetahui apa yang dilakukan di tingkat kabupaten.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah (atau SKPD) masih menentang usulan desa karena beberapa alasan:
  - o Tidak adanya standardisasi proposal desa
  - o Rencana desa yang tidak konsisten dengan rencana di tingkat kabupaten
  - o Usulan desa terlalu kecil bagi instansi kabupaten
  - o Program wajib dari 'atas' (kecamatan, kabupaten, propinsi ataupun pusat) menggunakan sebagian besar dana yang disediakan, sehingga hanya menyisakan sedikit untuk proposal dari tingkat masyarakat.
- Dikarenakan kebanyakan dari setrawan (pegawai negeri yang khusus ditugaskan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat) adalah pegawai tidak tetap, maka posisi mereka dalam pemerintahan cenderung lemah. Oleh karena itu, para setrawan tidak selalu berhasil menjembatani prioritas masyarakat dan SKPD terkait.
- P2SPP telah menciptakan jejaring sosial antar berbagai pemangku kepentingan, bahkan sampai ke luar lingkup desa. Hal ini berpotensi mempromosikan prioritas masyarakat pada tingkat kabupaten.
- Advokasi kebijakan melalui 'dialog multi-pemangku kepentingan' dapat menggalang komitmen pemerintah daerah untuk membuat dan menerapkan inovasi.

Laporan ini merekomendasikan untuk memperjelas hubungan hukum antara



### **Proyek:**

PNPM Integrasi

### **Lokasi Studi:**

Nusa Tenggara Timur,  
Yogyakarta, Jawa Barat,  
Jawa Tengah, Kalimantan  
Selatan, Jambi

### **Metodologi:**

Kualitatif

### **Bahasa:**

Inggris

### **Kata Kunci:**

Perencanaan, SKPD, DPRD,  
fasilitator, Setrawan

---

proses perencanaan masyarakat dan pemerintah. Satuan-satuan tugas khusus di setiap kecamatan harus saling berbagi informasi secara terbuka, bebas dan secepat mungkin, termasuk saling berbagi informasi terkait anggaran dan rencana kecamatan ke desa-desa sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat masyarakat. Semua sumber dana desa harus dikonsolidasikan ke dalam sebuah anggaran tunggal. Fungsi setrawan harus dijadikan posisi permanen dan melekat di kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di tingkat kabupaten dan juga kepala bagian SKPD. Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) harus menjembatani masyarakat, SKPD, dan DPRD.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7059>

## EVALUASI PROSES DARI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)-PERKOTAAN (*PROCESS EVALUATION OF PNPM URBAN*)

### RAND Labor and Population

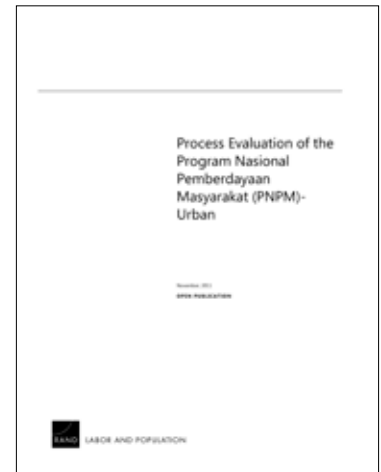
Diterbitkan Oleh: RAND Labor and Population untuk PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

Evaluasi proses ini melihat fase PNPM Perkotaan saat ini dan skema rintisan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Evaluasi ini juga mengajukan pertanyaan apakah tujuan proyek telah tercapai, dan mengambil beberapa praktik terbaik serta pembelajaran untuk masa depan:

- Masyarakat puas dengan infrastruktur yang dibangun lewat program PNPM Perkotaan, yang pada umumnya berkualitas tinggi.
- Partisipasi perempuan dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, sebagian besar sebagai pekerja dan penyedia makanan ringan dan minuman.
- Warga miskin perkotaan cenderung tersebar secara geografis, sehingga sulit untuk mengklasifikasikan daerah tertentu sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan “yang tinggi.”
- Tampaknya tidak banyak terdapat duplikasi kegiatan atau prioritas, sebagian besar karena kebanyakan wilayah mengikutsertakan PNPM Perkotaan ke dalam Musrenbang.
- Fasilitator yang terlibat, secara konsisten telah berhasil meningkatkan kualitas proyek. Namun beban kerja dari para fasilitator berlebihan beban kerjanya sehingga mereka kewalahan. Praktik rotasi fasilitator cukup mengganggu kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Karakteristik pribadi, pengalaman dan pelatihan adalah sifat-sifat penting yang paling sering disebut dari kriteria fasilitator yang sukses. Fasilitator yang efektif mempromosikan program tanpa lelah, dan membangun kapasitas masyarakat, bukan semata-mata menegakkan aturan.
- Audit adalah kunci dalam membatasi atau mencegah penyalahgunaan dana.

Evaluasi ini merekomendasikan untuk memperbaiki sistem informasi manajemen (MIS) yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan audit, namun sering berisi data yang buruk. Dana PLPBK yang dialokasikan untuk pemasaran tidak banyak memberi pengaruh dan perlu dikurangi.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=6525>



**Proyek:**  
PNPM Perkotaan

**Lokasi Studi:**  
Yogyakarta, Jawa Barat,  
Jawa Timur, Sumatra Utara,  
Jakarta, Jawa Tengah,  
Sulawesi Selatan

**Metodologi:**  
Campuran

**Bahasa:**  
Inggris

**Kata Kunci:**  
Kemiskinan perkotaan,  
penargetan, audit

**Proyek:**

PNPM Generasi

**Lokasi Studi:**

Sampel seluruh Indonesia, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur

**Metodologi:**

Campuran

**Bahasa:**

Inggris

**Kata Kunci:**

Kesehatan, pendidikan, insentif

## INDONESIA'S PNPM GENERASI PROGRAM: FINAL IMPACT EVALUATION REPORT

**Benjamin A. Olken, Junko Onishi, Susan Wong**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

Laporan ini menjelaskan temuan dari tiga gelombang evaluasi PNPM Generasi, yaitu: survei rona awal (*baseline*), survei titik tengah (*midpoint*) setelah 15-18 bulan pelaksanaan proyek, dan evaluasi akhir setelah 27-30 bulan pelaksanaan proyek. Putaran ketiga dan terakhir ini mengumpulkan tanggapan dari 45.000 orang, yaitu anggota rumah tangga, kepala desa, staf sekolah dan fasilitas layanan kesehatan. Evaluasi ini juga menyertakan temuan dari studi Kualitatif di 12 desa di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. Temuan utama meliputi:

- Secara statistik, PNPM Generasi rata-rata berdampak positif yang signifikan atas 12 indikator yang menjadi sasaran dalam desain, dengan dampak terbesar terlihat pada wilayah dengan indikator rona awal (*baseline*) kesehatan dan pendidikan yang rendah.
- PNPM Generasi menunjukkan bahwa model pembangunan nasional berbasis masyarakat dapat diadaptasi untuk kegunaan lainnya.
- Dampak jangka panjang utama PNPM Generasi adalah penurunan tingkat malnutrisi (gizi buruk). Tingkat malnutrisi pada anak-anak berkurang sebesar 2,2%, yaitu penurunan sebesar kurang lebih 10% dari tingkat kontrol. Penurunan tingkat malnutrisi yang paling nyata terlihat di wilayah dengan tingkat malnutrisi awal yang lebih tinggi, terutama di provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana tingkat gizi kurang (*underweight*) berkurang sebesar 8,8%, yaitu tingkat penurunan 20% dibandingkan daerah kontrol.
- Hasil yang cukup mengejutkan terjadi di Jawa, terdapat dampak negatif *stunting* (pertumbuhan terhambat) dan *stunting* berat yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
- Indikator pendidikan meningkat dalam evaluasi akhir kali ini, setelah dampak nol atau negatif atas indikator pendidikan yang ditemukan pada evaluasi sementara.
- Terkait hasil pembelajaran pendidikan pada jangka panjang, program ini belum terbukti dalam meningkatkan nilai tes anak-anak.
- Insentif kinerja terbukti meningkatkan efektivitas program pada bidang kesehatan namun tidak halnya dalam bidang pendidikan. Ada sejumlah alasan yang mungkin dapat menjelaskan mengapa, dan perlu adanya penelitian serta pengujian lebih lanjut untuk melihat apakah insentif dapat berdampak pada indikator pendidikan.
- Aturan tentang insentif kadang-kadang sulit dipahami oleh masyarakat.

Laporan ini menyarankan bahwa perluasan PNPM Generasi pada masa yang akan datang harus mengutamakan wilayah-wilayah dengan 12 indikator kunci yang masih tertinggal, serta belum tentu wilayah yang dikategorikan miskin. Pemerintah mungkin ingin melihat bagaimana insentif dapat bekerja di daerah tertinggal lainnya, misalnya program penanggulangan kemiskinan atau akses untuk air dan sanitasi; model intervensi dan insentif ini harus terus dipantau dan dievaluasi dengan benar. PNPM Generasi harus secara teratur terus meninjau 12 indikator target dan mempertimbangkan apakah indikator-indikator tersebut harus dilengkapi atau diganti. Dan evaluasi lanjutan mungkin diperlukan di masa yang akan datang yang bertujuan untuk memeriksa keberlanjutan jangka panjang dari intervensi serta dampaknya.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=5887>



## KELOMPOK MARJINAL DALAM PNPM-PERDESAAN

### AKATIGA

Diterbitkan Oleh: AKATIGA untuk PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

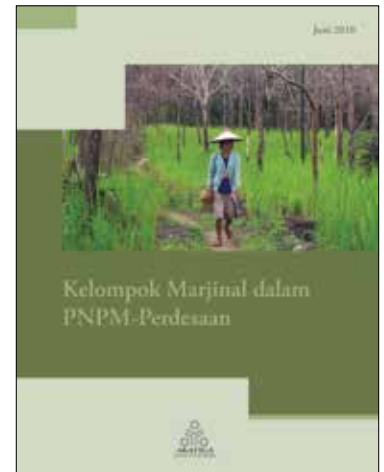
Studi ini berawal dari keprihatinan bahwa ada beberapa segmen masyarakat tertentu yang dikecualikan dari proses perencanaan pembangunan dalam PNPM Perdesaan. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam proyek lebih berpihak pada kelompok mayoritas dan yang lebih mampu dibandingkan penduduk desa yang lebih miskin dan masyarakat di daerah terpencil. Studi ini dilakukan untuk lebih memahami dinamika sosial-ekonomi dan politik dari partisipasi dan marginalisasi. Laporan ini menemukan bahwa:

Sehubungan dengan partisipasi (atau non-partisipasi) dalam PNPM Perdesaan, secara umum terdapat empat kelompok utama:

- Kelompok elit adalah orang kaya, pemimpin pemerintahan desa, tokoh agama dan ketua adat.
- Aktivis yang merupakan warga desa dengan pengetahuan tentang proyek-proyek pemerintah dan menggunakan pengetahuan ini untuk dapat terlibat. Para aktivis ini, seperti anggota kelompok tani dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), memiliki hubungan yang erat dengan para pemimpin pemerintahan. Bersama-sama, kalangan elit dan aktivis mendominasi pengambilan keputusan, termasuk juga dalam pertemuan perempuan.
- Kelompok mayoritas adalah mereka yang memiliki sedikit aset atau pendapatan rendah, seperti pemilik lahan kecil, tukang ojek, buruh industri kecil dan pedagang keliling.
- Kelompok marginal adalah mereka yang tidak memiliki aset (yang berharga), tinggal di daerah terpencil dengan infrastruktur dasar yang terbatas, memiliki pendapatan yang terbatas dengan jumlah tanggungan yang banyak, serta berasal dari kelompok etnis/agama minoritas. Kemiskinan saja belum tentu diartikan sebagai marginalisasi.

Peningkatan PNPM yang pesat pada tahun 2009 telah menimbulkan serangkaian masalah yang turut berkontribusi pada marginalisasi, seperti:

- Fasilitator yang tidak memiliki keterampilan untuk mengedepankan agenda pemberdayaan.
- Fokus lintas-program terlalu berpaku pada administrasi dibandingkan dengan aspek pemberdayaan.
- Pengawasan dan evaluasi telah menjadi sesuatu yang mekanistik, dan pemantauan kualitatif cenderung menurun. Walaupun data terkait angka partisipasi dikumpulkan, namun data kualitas partisipasi tidak dikumpulkan.
- Keterlambatan dalam pencairan sangat merusak kepercayaan atas program ini.
- Dana yang terlambat sering kali dimanfaatkan untuk kegunaan lainnya, selain yang diusulkan di awal.



#### Proyek:

PNPM Perdesaan

#### Lokasi Studi:

Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat

#### Metodologi:

Kualitatif

#### Bahasa:

Inggris, Indonesia

#### Kata Kunci:

Kemiskinan, kelompok marginal, eksklusi, *elite capture*, pemberdayaan, fasilitator

---

Laporan ini merekomendasikan untuk memberikan PNPM fokus sektoral yang lebih spesifik — infrastruktur perdesaan — yang dapat lebih mudah diselenggarakan dan difasilitasi secara lebih efektif. Memilih proyek secara plebisit (pemungutan suara langsung) akan mengurangi ketergantungan pada fasilitator untuk menarik suara masyarakat miskin dalam diskusi yang besar di tingkat desa. Proposal harus diberi bobot untuk mendukung dusun dengan populasi yang lebih kecil dan mereka yang tinggal lebih jauh dari pusat desa. Fasilitator harus mengorganisir kelompok marginal, namun program tidak harus memberikan kelompok-kelompok tersebut manfaat khusus, tapi fokus pada menyejajarkan kelompok marginal dengan kelompok masyarakat pada umumnya.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=4444>

**Versi Bahasa Inggris:**

*Marginalized Groups in PNPM Rural* <http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=4442>

## KAPASITAS DESA DALAM MEMELIHARA INFRASTRUKTUR: BUKTI DARI PEDESAAN INDONESIA

**Arya Gaduh**

Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

PNPM memberikan prioritas kepada desa-desa miskin, dan berasumsi bahwa desa-desa tersebut memiliki sumber daya untuk memelihara apa yang mereka bangun, atau bersedia menggunakan sumber daya tersebut untuk pemeliharaan infrastruktur. Studi ini bertujuan untuk menguji asumsi tersebut diatas. Apakah desa memang memiliki sumber daya? Apakah mereka bersedia untuk menggunakan sumber dayanya? Apa sajakah karakteristik desa-desa yang dapat dan akan memelihara infrastruktur mereka? Laporan ini menemukan bahwa:

- Tenaga kerja dan uang yang dibutuhkan untuk memelihara infrastruktur desa ternyata menjadi semacam pajak bagi masyarakat. Meskipun jumlahnya kecil, uang ini sering sulit untuk dikumpulkan sehingga efeknya cukup memberatkan bagi masyarakat miskin.
- Namun demikian, kesediaan masyarakat untuk berkontribusi tetap tinggi.
- Tenaga kerja masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa agak kurang dihargai, sehingga warga miskin masih terbebani biaya pemeliharaan yang secara proporsional lebih tinggi.

Kebanyakan desa tidak memelihara infrastruktur mereka, namun desa-desa yang melakukannya:

- Menerima tanggapan terhadap keluhan tentang kualitas infrastruktur yang dibangun.
- Menerima informasi lebih banyak dari PNPM dan pemimpin desa tentang penggunaan dana proyek.
- Telah menerima alokasi dana desa (ADD) secara tepat waktu.

Laporan ini merekomendasikan agar pemeliharaan infrastruktur desa ditugaskan kepada peran yang spesifik di lingkungan desa dan pada pemerintah setempat. Pemerintah kabupaten harus sudah mulai mentransisikan alokasi penggunaan dana dari peningkatan kualitas infrastruktur ke ranah pemeliharaan, serta semua proyek infrastruktur yang baru harus mengikutsertakan rencana pemeliharaan.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=4443>

### Versi Bahasa Inggris:

*Village Capacity in Maintaining Infrastructure: Evidence from Rural Indonesia*

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=4445>



### Proyek:

PKK, PNPM Perdesaan

### Lokasi Studi:

Lampung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan

### Metodologi:

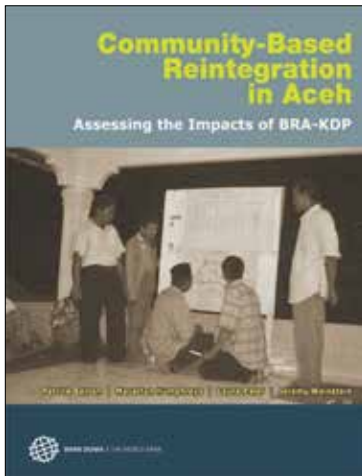
Kuantitatif

### Bahasa:

Inggris

### Kata Kunci:

Infrastruktur desa, pemeliharaan, perencanaan

**Proyek:**

BRA-KDP

**Lokasi Studi:**

Aceh

**Metodologi:**

Kuantitatif

**Bahasa:**

Inggris

**Kata Kunci:**

Konflik, keterpaduan sosial, reintegrasi

## **COMMUNITY-BASED REINTEGRATION IN ACEH: ASSESSING THE IMPACTS OF BRA-KDP**

**Patrick Barron, Macartan Humphreys, Laura Paler,  
Jeremy Weinstein**

Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

Makalah ini mengevaluasi program Bantuan Reintegrasi Berbasis Masyarakat untuk Korban Konflik (*Community-Based Reintegration Assistance for Conflict Victims program*, BRA-KDP), sebuah upaya inovatif dari pemerintah setempat bersama dengan pemerintah pusat untuk menerapkan pembelajaran dari keberhasilan kerja pembangunan masyarakat di masa yang lalu pada Aceh pasca-konflik. Makalah ini menggunakan data dari Survei Penghidupan dalam Reintegrasi Aceh (*Aceh Reintegration Livelihood Surveys*, ARLS) untuk menilai seberapa baik program ini telah berjalan, apa saja dampaknya, dan bagaimana dampak-dampak tersebut terjadi. Temuan utama meliputi beberapa hal dibawah ini:

- Secara umum, program ini hanya sedikit lebih baik dalam menjangkau korban konflik dibandingkan dengan yang bukan korban.
- Program BRA-KDP dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan yang pesat dan perbaikan persepsi tentang kesejahteraan.
- Partisipasi desa dikaitkan dengan penurunan sebesar 11 poin dalam kategori masyarakat yang digolongkan “miskin” oleh kepala desa.
- Kohesi atau relasi sosial antara warga negara dengan negara masih lemah.
- Tidak ada bukti yang kuat bahwa program BRA-KDP telah meningkatkan kapasitas desa dalam penyelesaian masalah bersama.

Para penulis mengingatkan bahwa perbedaan struktural antara masyarakat di lokasi BRA-KDP dan masyarakat yang tidak mendapatkan intervensi program, membuat perbandingan yang berarti menjadi sulit. Untuk mengatasi bias semacam ini, laporan tersebut mengandalkan serangkaian metode statistik yang sekilas mungkin tampak terlalu rumit. Penulis juga menunjukkan bahwa program BRA-KDP telah mengangkat dua persoalan yang erat kaitannya dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pertama, dengan diberikan kendali penuh atas dana proyek, masyarakat Aceh memilih untuk mengesampingkan proses-proses yang membangun kohesi sosial. Kedua, meskipun pemberdayaan dan lembaga yang terbangun lewat program BRA-KDP ini dapat menciptakan kondisi bagi perdamaian dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek program ini mendorong berbagai kelompok kepentingan untuk bersaing dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas, sehingga dapat menyebabkan perpecahan sosial.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=2698>

## **DELIVERING ASSISTANCE TO CONFLICT-AFFECTED COMMUNITIES: THE BRA-KDP PROGRAM IN ACEH**

**Adrian Morel, Makiko Watanabe, Robert Wrobel**  
Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

Studi ini mengulas program Bantuan Reintegrasi Berbasis Masyarakat untuk program Korban Konflik (BRA-KDP), sebuah upaya inovatif pemerintah setempat dan pemerintah pusat untuk menerapkan pembelajaran dari keberhasilan kerja pembangunan masyarakat di masa yang lalu pada saat Aceh pasca-konflik. Penelitian ini melengkapi studi *"Community-Based Reintegration in Aceh: Assessing the Impacts of BRA-KDP"* (2009) yang sudah dilaksanakan sebelumnya dengan data tambahan dari sistem informasi manajemen terpadu (MIS) dalam program BRA-KDP, serta kunjungan pengawasan, dan dari kerja lapangan yang bersifat kualitatif. Temuan utama dari studi ini meliputi:

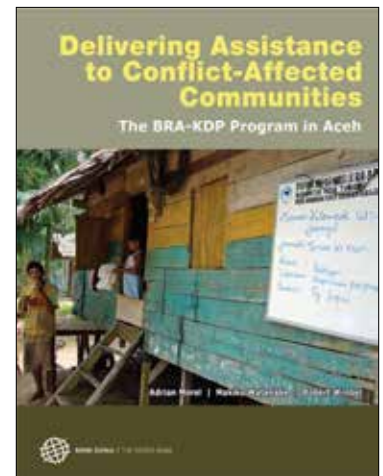
- Penargetan masyarakat penerima manfaat secara umum berjalan baik.
- Partisipasi masyarakat kuat, bahkan di antara kelompok-kelompok rentan seperti korban konflik dan perempuan.
- Mantan pejuang GAM memengaruhi program baik secara positif maupun negatif, tergantung pada sejarah dan kondisi setempat.
- Program BRA-KDP memiliki efek positif pada kesejahteraan masyarakat, dan menunjukkan bahwa dengan sistem penyampaian yang tepat, dana yang ditujukan sebagai kompensasi, dapat berdampak pada pembangunan.
- 89% dana program digunakan untuk kegiatan penghidupan (*livelihoods*), bukan untuk kegunaan umum. Hal ini terlihat sangat sangat kontras dengan program PPK pada daerah lainnya di Indonesia.

Beberapa modifikasi seharusnya dapat membantu proyek bekerja lebih baik:

- Menghubungkan program BRA-KDP secara jelas dengan kewajiban-kewajiban yang didefinisikan dalam MoU Helsinki
- Pelatihan yang lebih baik untuk para fasilitator
- Menghubungkan proyek-proyek kecil terkait penghidupan dengan sumber modal dan bantuan teknis dari luar

Laporan ini merekomendasikan agar penargetan di masa mendatang tidak didasarkan pada identitas di era konflik, namun juga pada indikator standar seperti tingkat kesejahteraan dan pendidikan.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=2696>



### **Proyek:**

BRA-KDP

### **Lokasi Studi:**

Aceh

### **Metodologi:**

Campuran

### **Bahasa:**

Inggris

### **Kata Kunci:**

Penargetan, konflik, partisipasi, mantan gerilyawan, penghidupan

**Proyek:**

PPK, PNPM Perdesaan

**Lokasi Studi:**

Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara

**Metodologi:**

Kuantitatif

**Bahasa:**

Inggris

**Kata Kunci:**

Infrastruktur perdesaan, pemeliharaan

## **OPERATION AND MAINTENANCE OVERVIEW FOR PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) AND PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM): TO ASSESS THE OPERATION AND MAINTENANCE OF PPK AND PNPM IMPLEMENTED MICRO-INFRASTRUCTURE PROJECTS IN INDONESIA BETWEEN 1999 AND 2007**

**Ted E. Kulongsoski**

Diterbitkan Oleh: PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

Studi ini menelaah proyek-proyek “infrastruktur-mikro” yang dibangun oleh PPK antara tahun 1999 dan 2007 untuk melihat bagaimana proyek-proyek tersebut bertahan. Beberapa pertanyaan kunci seperti, apakah infrastruktur mikro yang dibangun masih berfungsi? Dan apakah infrastruktur mikro masih dipelihara? Studi ini mengasumsikan bahwa segala sesuatu yang dirancang dan dibangun, dapat berfungsi secara penuh, walaupun mungkin tidak selalu begitu. Temuan penting dari studi ini adalah sebagai berikut:

- Dari 657 proyek mikro infrastruktur yang diteliti, 72%-nya berkualitas baik, 21%-nya berfungsi sebagian, dan hanya 7% yang tidak berfungsi. Hampir sepertiga dari proyek-proyek yang tidak berfungsi disebabkan oleh rusaknya pompa, motor atau generator yang sebagian besar memang dari awalnya sudah berkualitas rendah.
- Proyek yang awalnya berfungsi baik, cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu, dikarenakan adanya masalah dengan desain/rancangan, konstruksi, atau pemeliharaan yang pada akhirnya terlihat dengan jelas.
- Dikarenakan perencanaan dan pertukaran informasi yang kurang baik, hal ini menyebabkan masyarakat dan kementerian sektoral, sekadar saling menjiplak proyek masing-masing.
- Desa-desanya tidak menyusun rencana pemeliharaan.

Laporan ini merekomendasikan untuk sebanyak mungkin mengurangi masalah pemeliharaan di masa yang akan datang. Misalnya dengan membeli peralatan yang lebih baik dan memastikan bahwa operator setempat mengetahui cara memperbaiki barang-barang jika rusak. Sumber energi alternatif seperti tenaga surya dan tenaga air dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merupakan penghematan biaya yang sangat penting. Masyarakat harus dibimbing dan didukung secara terus menerus. Selain itu juga diperlukan adanya pengawasan untuk memastikan beberapa hal penting, yaitu rancangan awal sudah sebaik mungkin,, masyarakat sudah mengumpulkan kontribusi, dan pemeliharaan juga telah disediakan.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=2272>



## ***DIRECT DEMOCRACY AND LOCAL PUBLIC GOODS: EVIDENCE FROM A FIELD EXPERIMENT IN INDONESIA (NBER WORKING PAPER NO. 14123)***

**Benjamin A. Olken**

Diterbitkan Oleh: National Bureau of Economic Research,  
Cambridge

Keputusan dalam sebuah program pembangunan berbasis masyarakat, termasuk PPK dan PNPM, seringkali dibuat dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, dan bukan oleh masyarakat umum, sehingga meningkatkan risiko terjadinya dominasi kaum elit (*elite capture*). Untuk menyelidiki pertanyaan tersebut, makalah ini membandingkan dua metode pemilihan proyek yang berbeda di PPK: oleh perwakilan dan pemilihan langsung. Makalah ini menemukan bahwa:

- Dua metode yang berbeda ini berdampak kecil pada jenis proyek yang dipilih, namun berdampak besar pada tingkat kepuasan dan kerelaan masyarakat untuk menyumbangkan waktu atau uangnya.
- Proses yang dihadiri baik laki-laki ataupun perempuan, lebih menghasilkan pilihan kaum laki-laki.
- Perbedaan dalam waktu yang digunakan sangatlah besar: pemungutan suara dilakukan dalam sepuluh menit, sementara mencari konsensus memakan waktu tiga jam.
- Tidak ada bukti tentang pembelian suara.

Meskipun ini hanyalah sebuah studi jangka pendek, makalah ini menunjukkan bahwa penentuan keputusan melalui pemungutan suara mungkin tidak akan mengubah jenis proyek yang dipilih, namun lebih berdampak besar pada tingkat kepuasan masyarakat dan memberikan legitimasi lebih besar pada prosesnya.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=7074>

<http://www.nber.org/papers/w14123>



### **Proyek:**

PPK

### **Lokasi Studi:**

Jawa Timur, Sumatra Utara,  
Sulawesi Tenggara

### **Metodologi:**

Kuantitatif

### **Bahasa:**

Inggris

### **Kata Kunci:**

Plebisit, representasi,  
pemungutan suara,  
kuantitatif, kepuasan,  
pemilihan proyek

**Proyek:**

PPK

**Lokasi Studi:**

Sampel seluruh Indonesia

**Metodologi:**

Kuantitatif

**Bahasa:**

Inggris

**Kata Kunci:**

Konsumsi, pengangguran, kemiskinan

## **IMPACT EVALUATION OF THE SECOND PHASE OF THE KECAMATAN DEVELOPMENT PROGRAM IN INDONESIA**

**John Voss**

Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

Evaluasi kuantitatif ini menilai apakah PPK Tahap 2 berhasil meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, mengangkat rumah tangga miskin keluar dari kemiskinan, meningkatkan akses atas layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja, dan memberikan manfaat kepada kelompok miskin dan yang lemah. Temuan penting dari evaluasi ini adalah sebagai berikut:

- Dibandingkan dengan rumah tangga miskin di daerah yang tidak menerima program PPK2 (daerah kontrol), konsumsi riil per kapita rumah tangga miskin di daerah PPK2 lebih tinggi sekitar 11%.
- Dibandingkan dengan daerah kontrol, kenaikan konsumsi rumah tangga di tingkat kecamatan dalam kuintil termiskin 5% lebih tinggi.
- Dibandingkan dengan daerah kontrol, proporsi rumah tangga yang keluar dari kemiskinan di kecamatan miskin 9,2% lebih tinggi. Dan proporsi rumah tangga yang jatuh miskin 4,5% lebih rendah dibandingkan dengan proporsi di daerah kontrol.
- Proporsi kepala rumah tangga yang mendapatkan akses rawat jalan di daerah penerima program PPK2, 11,5% lebih tinggi daripada di daerah kontrol.
- Program PPK2 telah menurunkan tingkat pengangguran sebesar 1,5%.
- Di kecamatan yang tidak begitu miskin, rumah tangga rata-rata tidak melihat adanya manfaat ataupun dampak negatif dari program PPK2.
- Kelompok yang lemah (*disadvantaged*), seperti rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan atau orang-orang yang berpendidikan rendah, lebih kecil kemungkinannya memperoleh manfaat dari program ini.

Laporan ini menekankan pada hasil yang buruk di kecamatan yang tidak begitu miskin, menengarai bahwa di wilayah-wilayah tersebut, strategi program PPK harus diubah. Kunci perubahan ini adalah memberikan fokus yang lebih besar untuk memastikan agar manfaat program dapat menjangkau kelompok-kelompok marjinal, termasuk perempuan dan orang-orang dengan tingkat pendidikan yang rendah. Laporan ini merekomendasikan bahwa pada putaran berikutnya, penelitian berfokus pada dinamika sosial dan tata kelola, serta mengikutsertakan survei bagi individu, dan tidak hanya untuk rumah tangga.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=1447>

<http://bit.ly/1FzI7i9>

## **MICRO CREDIT STRATEGY FORMULATION MISSION FOR THE NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM OR PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)**

### **Yayasan MICRA**

Diterbitkan Oleh: Yayasan MICRA untuk PNPM Support Facility – Bank Dunia, Jakarta

Sektor keuangan mikro di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia, dengan lebih dari 20.000 lembaga keuangan mikro (LKM) yang melayani lebih dari 15 juta orang di Indonesia. Namun setidaknya lebih dari 40 juta masih belum dapat memiliki akses atas layanan keuangan. Baik karena mereka hidup jauh dari jangkauan sektor keuangan formal, atau juga dianggap tidak menguntungkan. Laporan ini mengkaji penyelenggaraan kredit mikro saat ini yang melekat pada PPK dan P2KP, dan menguraikan strategi untuk memperbaiki pengaturannya untuk PNPM. Temuan utama dari kajian ini meliputi beberapa hal dibawah:

- Adanya permintaan untuk lebih banyak kredit mikro. PPK/P2KP kini melayani 6,8 juta orang.
- Keberhasilan telah terjadi meskipun kebijakan terkait, prosedur, pelatihan, dan harga produk belum memadai.
- Sistem kredit mikro PPK/P2KP belum disertifikasi secara hukum sebagai LKM. Tidak adanya status hukum inilah yang menghambat program untuk mengikutsertakan komponen simpanan/tabungan.
- Manajemen dan evaluasi sumber daya manusia pada saat ini masih sangat sederhana. Baik PPK maupun P2KP belum menetapkan target yang jelas atau mengukur kinerja secara efektif. Seorang pegawai/tenaga lapangan yang terlatih sangat penting untuk kualitas, keberhasilan dan keberlanjutan kedua program ini. Namun sebagian besar pegawai hanya memiliki pengalaman mengelola program kredit mikro yang terbatas.
- Penelitian lapangan mengungkapkan adanya tingkat pergantian pegawai yang tinggi, dikarenakan oleh adanya penggelapan dana dan korupsi, terutama terkait kurang kuatnya mekanisme kontrol dan lemahnya kapasitas Musyawarah Antar Desa (MAD).
- Data yang digunakan oleh UPK — tingkat tunggakan dan jumlah lewat jatuh tempo — menilai kualitas portofolio secara berlebihan. Praktik terbaik internasional merekomendasikan bahwa maksimal 5% dari portofolio berisiko (PAR) adalah hal yang baik untuk kredit mikro.
- Penargetan masyarakat mendistribusikan pinjaman berdasarkan anggapan bahwa penerima layak dan membutuhkan, bukan pada kualitas rencana atau kemampuan mereka untuk membayar.

Laporan ini mengusulkan lima opsi untuk masa yang akan datang, yang mana



### **Proyek:**

PPK, P2KP

### **Lokasi Studi:**

Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan

### **Metodologi:**

Campuran

### **Bahasa:**

Inggris

### **Kata Kunci:**

Kredit mikro, dana pinjaman bergulir

---

semuanya menyarankan pemisahan antara kredit mikro dari pemrograman berbasis hibah lainnya, serta menambahkan adanya komponen simpanan/tabungan, yang merupakan unsur kunci dari keuangan mikro yang efektif dan berkelanjutan.

Opsi-opsi tersebut adalah:

- Melaksanakan kredit program melalui institusi perbankan.
- Menghubungkan kelompok masyarakat dengan bank.
- Mengalihkan kepemilikan dan manajemen ke tingkat desa.
- Memimpin pembentukan koperasi (Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes).
- Memberikan hak kepemilikan atas lembaga pengawasan keuangan atau (setidaknya) hak atas laba di lembaga keuangan mikro yang baru.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=1939>

<http://bit.ly/1K7oE7w>

## SURVEI DESA ACEH 2006: EVALUASI KEADAAN PRASARANA DAN SOSIAL DESA

**PPK**

Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

Tiga dekade konflik, bencana gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 telah berdampak sangat buruk pada kondisi fisik dan jalinan sosial di Aceh. Untuk memberikan gambaran yang akurat dari kondisi terkini di desa-desa Aceh, PPK melakukan penilaian status infrastruktur dan situasi sosial di seluruh provinsi, meliputi hampir semua desa di wilayah Aceh. Laporan ini menemukan beberapa hal seperti dibawah ini:

- Kemiskinan tersebar luas di seluruh provinsi.
- Lebih dari 50% dari infrastruktur telah rusak, baik diakibatkan oleh konflik (19,5%), bencana alam (38,6%), maupun kurangnya pemeliharaan (41,9%). Total biaya untuk mengganti semua ini diperkirakan dapat mencapai USD 1,3 miliar.
- Investasi besar masih diperlukan di Aceh, khususnya akibat tsunami, konflik, dan penelantaran selama bertahun-tahun. Total biaya perbaikan infrastruktur diperkirakan dapat mencapai Rp 20 triliun, atau sekitar USD 2,2 miliar.
- Lebih banyak rumah tangga dilaporkan telah berpindah dari wilayah asalnya, diakibatkan oleh konflik, dibandingkan karena tsunami. Dan jumlah pengungsi akibat konflik yang kembali ke wilayah asal ditemukan lebih rendah.
- Dibandingkan pengungsi karena tsunami, pengungsi akibat konflik dipersepsikan jauh lebih buruk kondisi perekonomiannya.
- "Modal sosial" tinggi. Tingkat eksklusi di Aceh rendah dan musyawarah desa dianggap sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang utama.
- Proses berbasis masyarakat adalah metode yang paling efektif untuk mengarahkan investasi.

Menurut laporan ini, walaupun kecil kemungkinan kembali terjadinya konflik, tetapi berbagai indikator mengindikasikan bahwa di bawah permukaan masih ada berbagai permasalahan. Upaya untuk mendukung proses pembangunan perdamaian pasca konflik harus terus berjalan dan harus mencakup hal-hal seperti: sosialisasi berkelanjutan tentang layanan publik dan proses perdamaian; pembekalan pemimpin setempat dengan informasi mutakhir dan akurat tentang program-program reintegrasi; dan peningkatan keamanan. Proses berbasis masyarakat adalah yang paling efektif untuk mengarahkan investasi, namun perhatian khusus harus terus diberikan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat — khususnya perempuan, yang kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan di Aceh — memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, dan berkontribusi, dalam proses pembangunan daerah.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=1084>

### Versi Bahasa Inggris:

*2006 Village Survey in Aceh: An Assessment of Village Infrastructure and Social Conditions*

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=1074>

<http://bit.ly/1ySgGht>



### Proyek:

PPK

### Lokasi Studi:

Aceh

### Metodologi:

Kuantitatif

### Bahasa:

Inggris, Indonesia

### Kata Kunci:

Konflik, pengungsi domestik (IDP), infrastruktur perdesaan

**Proyek:**

PNPM Perdesaan, PPK,  
PNPM Perkotaan, NUSPP,  
WSLIC-2, ACCESS

**Bahasa:**

Inggris, dengan ringkasan  
eksekutif dalam Bahasa  
Indonesia

**Kata Kunci:**

Gender, perempuan,  
kelompok marjinal,  
fasilitator

## ***GENDER IN COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT: IMPLICATIONS FOR PNPM STRATEGY***

**Bank Dunia**

Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

Sebagai sebuah program nasional yang menjangkau hampir setiap sudut negeri, PNPM memberikan sebuah kesempatan unik dalam menangani isu-isu gender dan ketidaksetaraan. Laporan ini mengkaji peran gender dalam PPK, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan beberapa proyek lainnya.

- Pelatihan gender lebih mungkin memberikan dampak, ketika masuk dalam pedoman pemerintah. Pendekatan yang fleksibel diperlukan untuk menjangkau perempuan. Pertemuan secara terpisah membantu, tetapi mungkin memarginalisasi perempuan dari proses yang dilakukan oleh peserta campuran, laki-laki dan perempuan.
- Prosedur program semakin mengukuhkan perempuan elit dalam posisi yang memiliki kekuasaan.
- Faktor-faktor budaya setempat mendefinisikan peran perempuan.
- Hanya sedikit pegawai dengan kesadaran gender yang cukup; tetapi mereka yang sadar akan kesetaraan gender, memberikan dampak yang signifikan.
- Langkah afirmatif lebih efektif pada tingkatan bawah.
- Hanya ada bukti semu bahwa fasilitator perempuan lebih efektif dalam pemberdayaan kaum perempuan.
- Kelompok simpan pinjam perempuan sangat jarang mengikutsertakan yang paling miskin, kecuali bila secara eksplisit disyaratkan oleh program.

Laporan ini merekomendasikan untuk menyepakati konsensus umum tentang tujuan kesetaraan gender, berdasarkan tiga bidang pemberdayaan, yaitu: ekonomi, politik, dan sosial. Eksperimen terkontrol dapat membantu dalam menentukan jenis rancangan program mana yang menawarkan kesempatan terbaik kepada perempuan untuk menduduki posisi dengan tanggung jawab. Disamping itu, perlunya diberikan pelatihan gender kepada pemimpin laki-laki. Kebanyakan fasilitator perempuan berada dalam usia subur; Unit kerja yang mengelola penempatan sumber daya manusia harus juga mengakomodir kebutuhan para fasilitator perempuan untuk cuti melahirkan dll, sehingga mereka tidak perlu berhenti dari pekerjaan mereka ketika memiliki anak.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=1111>

<http://bit.ly/1bkF6W5>

**Versi Bahasa Indonesia:**

Ringkasan Eksekutif Kajian Gender dalam Proyek Pembangunan Berbasis Komunitas:  
Implikasi bagi PNPM Mandiri

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=1112>



## KECAMATAN DEVELOPMENT PROGRAM QUALITATIVE IMPACT EVALUATION

Karrie McLaughlin, Adam Satu, Michael Hoppe

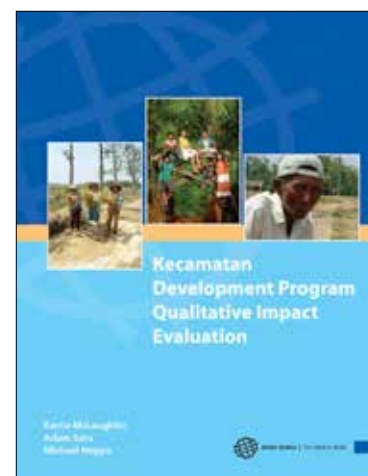
Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

Program PPK dirancang seputar prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan harapan, antara lain, bahwa dengan mengekspos masyarakat pada ide-ide ini program akan memicu permintaan pada tingkat akar rumput untuk layanan lebih baik, dan tidak hanya dalam proses PPK itu sendiri, namun juga dari pemerintah secara umum. Evaluasi dampak kualitatif ini mengajukan pertanyaan antara lain apakah efek dampak pengiring (*spillover effect*) ini terjadi; apakah PPK telah mampu mengubah praktik pemerintah, dan apakah hal tersebut meningkatkan kapasitas warga desa untuk lebih baik dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan kebutuhan pembangunan masyarakat, atau menyuarakan diri dalam keputusan ekonomi, politik dan sosial yang memengaruhi kehidupan mereka. Studi ini juga mengkaji dampak PPK pada kelembagaan masyarakat, kemampuan perempuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan. Beberapa temuan kunci dari evaluasi ini adalah sebagai berikut:

- PPK mendukung tata kelola yang baik melalui pelatihan dan dukungan, namun perubahan nyata sulit ditemukan. Walaupun PPK mendorong masyarakat agar menuntut perbaikan tata kelola, tapi hal ini lebih sering mengarah kepada konflik, dibandingkan dengan perbaikan.
- PPK sangat baik dalam menanggulangi kemiskinan di tingkat desa, namun ini dilakukan dengan membantu semua lapisan masyarakat, dan bukan dengan menysasar kelompok miskin.
- Faktor terkuat dalam keberhasilan PPK adalah dukungan dari kepala desa.
- Sistem yang mengirimkan perwakilan masyarakat ke pertemuan, bukannya membuka pertemuan itu kepada masyarakat umum, justru dapat menyamarkan dominasi elit dan memberikan kesan adanya partisipasi masyarakat.
- Kapasitas untuk tindakan kolektif paling kuat ditemukan pada tingkat dusun. Kompetisi untuk sumber daya antara dusun dalam satu desa bisa sangat sengit.
- PPK lebih baik dalam mendukung lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya, daripada mendirikan lembaga yang baru. Kecuali jika lembaga yang didirikan diperuntukkan dalam menerima manfaat program PPK.
- Keterlibatan perempuan sejalan dengan pola yang ditemukan di tingkat regional, yaitu kecilnya dampak PPK. Keberadaan program khusus untuk perempuan dapat mengakibatkan pengecualian perempuan dari program yang melibatkan baik laki-laki dan perempuan (peserta campuran).

Laporan ini merekomendasikan untuk meningkatkan keterlibatan di tingkat dusun, yang merupakan unit solidaritas alami. PPK perlu memberikan pelatihan kepada kepala desa agar dapat memahami posisi mereka dalam program. Badan Perwakilan Desa (BPD) harus kembali dijadikan badan yang dipilih oleh masyarakat, agar dapat mengimbangi kepala desa secara efektif.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=1085>



### Proyek:

PPK

### Lokasi Studi:

Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara

### Metodologi:

Kualitatif

### Bahasa:

Inggris

### Kata Kunci:

Kelembagaan desa, gender, perempuan, representasi, *elite capture*, tindakan kolektif, kompetisi, pemerintahan, limpahan

**Proyek:**

PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan

**Lokasi Studi:**

Sampel seluruh Indonesia

**Metodologi:**

Kuantitatif

**Bahasa:**

Inggris

**Kata Kunci:**

Ketenagakerjaan, kemiskinan, dampak, kredit mikro

## **THE EMPLOYMENT AND POVERTY IMPACT OF PNPM**

**Gustav F. Papanek**

Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

Salah satu manfaat utama dari PNPM adalah kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja, terutama bagi pekerja miskin dan tidak terampil. Makalah ini memperkirakan dampak program atas lapangan kerja dan pendapatan dalam rentang tahun 2007 sampai dengan 2010, serta menganalisis keadaan di mana efeknya bisa lebih besar atau lebih kecil. Beberapa temuan penting dari kajian ini adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2009, PNPM dapat memberikan manfaat kepada sekitar 24 juta pekerja, sehingga meningkatkan pendapatan mereka sebesar 10-14% untuk 60 hari kerja.
- Sekitar 6 juta keluarga akan keluar dari kemiskinan; 10 juta lainnya akan mendapatkan sedikit penghasilan tambahan, namun tidak cukup untuk membantu mereka keluar dari jurang kemiskinan.
- Dampak PNPM terutama akan terlihat sangat besar dikarenakan oleh:
  - o PNPM dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, ketika hanya ada sedikit pekerjaan lain yang tersedia, seperti:
    - \* masa senggang dalam siklus pertanian
    - \* pasca bencana alam
    - \* pasca kemunduran ekonomi lokal
  - o PNPM dapat merespon kebutuhan masyarakat, seperti menambah ke Jaring Pengaman Sosial (JPS).
- Jumlah masyarakat miskin juga ditentukan oleh:
  - o Harga beras dan kebutuhan pokok lainnya.
  - o Lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh sektor ekonomi lainnya.
  - o Berapa banyak yang diuntungkan oleh Bantuan Langsung Tunai.
- Dampak PNPM menjadi terbatas dikarenakan oleh:
  - o PNPM menyediakan hanya lapangan kerja tambahan dan bukan pekerjaan tetap. Berbagai perhitungan berasumsi bahwa PNPM memberikan 21 hari kerja, tetapi buruh tani (petani gurem) dan pemilik lahan sempit memerlukan setidaknya 60 hari kerja dalam setahun.
  - o PNPM menciptakan hanya sedikit pekerjaan untuk tenaga kerja profesional, teknis, dan pekerja kelas menengah lainnya.
  - o Lapangan kerja yang tersedia dalam PNPM tidak dapat membantu keluarga yang tidak memiliki siapapun, sebagai tenaga kerja.
- Alasan kecilnya dampak dari program PNPM perkotaan, diantaranya:
  - o Komponen perkotaan diperkirakan mempekerjakan hanya sepertiga dari jumlah pekerja dibandingkan dengan komponen perdesaan.
  - o Hibah P2KP dibuat hanya untuk satu tahun, sedangkan hibah PPK berlangsung selama antara 3 sampai 5 tahun

Laporan ini berpendapat bahwa PNPM harus menjadi bagian penting dari jaring pengaman sosial, meningkatkan investasi dari program ini dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di wilayah yang sangat miskin atau yang sedang mengalami kemerosotan sementara.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=3114>

# **CRISES AND CONTRADICTIONS: UNDERSTANDING THE ORIGINS OF A COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT IN INDONESIA\***

## Scott Guggenheim

Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

Makalah ini adalah tentang asal-usul PPK, dengan fokus pada peluang dan kendala yang memberikan tantangan bagi para ilmuwan sosial yang bekerja dalam lingkup birokrasi pada sektor pembangunan berskala besar. Bagian pertama makalah ini menggambarkan proyek dan faktor-faktor historis tertentu yang berujung pada eksperimen seperti PPK. Bagian kedua memberikan gambaran singkat mengenai akar etnografi dari PPK. Bagian akhir mengajukan pertanyaan bagaimana kosakata dalam bidang pembangunan dapat diperluas untuk mencakup wawasan kritis para ilmuwan sosial. Beberapa poin utama dari makalah ini adalah sebagai berikut:

- PPK dicanangkan ketika tiga lembaga berada dalam situasi krisis, yaitu:
  - o Pemerintah Orde Baru, yang runtuh di tengah-tengah krisis moneter Asia Tenggara;
  - o Bank Dunia, yang mengalami krisis legitimasi setelah peninjauan atas kebijakan terkait pemukiman kembali rudapaksa (*involuntary resettlement*) dan terungkapnya lingkup pengetahuan dari lembaga ini tentang praktik korupsi di Indonesia;
  - o Desa-desanya di Indonesia, di mana pembangunan negara dan UU Desa tahun 1979 telah melemahkan sumber-sumber otoritas tradisional.
- Temuan dari studi Lembaga Tingkat Lokal (LLI) oleh Bank Dunia menantang anggapan umum tentang pembangunan, diantaranya:
  - o Proyek milik masyarakat berfungsi lebih baik daripada proyek pemerintah, dengan partisipasi perempuan dan masyarakat miskin yang lebih baik serta kontribusi yang lebih tinggi dari masyarakat;
  - o organisasi masyarakat berumur panjang, melayani banyak tujuan, dan memiliki strategi untuk menuntut kepemimpinan dan penyelesaian sengketa;
  - o organisasi masyarakat tumbuh subur ketika diberi akses atas dana dengan peraturan yang jelas dan tidak dicampurtangani oleh pihak lain;
  - o permasalahan di tingkat desa bisa diselesaikan oleh para pejabat di tingkat kecamatan, atau dengan menjangkau lebih luas ke OMS.
- Temuan ini menengarai bahwa proyek yang efektif bukanlah sesuatu yang menghasilkan produk tertentu, melainkan merupakan sebuah proses yang membantu masyarakat desa dalam memecahkan masalah yang mereka identifikasi sendiri.
- Peneliti sosial dibutuhkan untuk menerjemahkan temuan tersebut ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh Bank Dunia dan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pembangunan. Untuk itu, kunjungan lapangan dan bahasa “modal sosial” terbukti menjadi kunci.
- Ide proses sejarah harus diikutsertakan ke dalam analisis Bank Dunia tentang politik dan ekonomi setempat (lokal). Sangatlah sedikit orang, misalnya, yang menyadari sejauh mana desa-desa di Indonesia sesungguhnya adalah hasil dari undang-undang 1979 tentang struktur desa.

## Proyek:

PNPM Perdesaan, PPK

## Bahasa:

Inggris

**Kata Kunci:**

Konteks sejarah, krisis moneter di Asia Tenggara, Orde Baru, UU Desa tahun 1979, modal sosial, desentralisasi



---

Makalah ini diakhiri dengan menyatakan bahwa PPK merupakan produk dari sebuah rangkaian sejarah tertentu. Karena berakarnya PPK dalam konteks sejarah Indonesia, anjuran untuk “meniru” atau “peningkatan skala” model itu harus disikapi dengan hati-hati. Kedua, proyek pembangunan seperti PPK dapat berkontribusi pada penataan ulang hubungan politik lokal. Premis dasar PPK adalah bahwa warga desa belajar tentang demokrasi dengan menjalankan demokrasi tersebut.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=3116>

<http://bit.ly/1GcKRTc>

Makalah ini telah dipublikasikan dalam buku *The Search for Empowerment: Social Capital as Idea and Practice*, diedit oleh Michael Woolcock, Scott E. Guggenheim, dan Elizabeth A. Olson, diterbitkan oleh Kumarian Press pada tahun 2006.

<http://bit.ly/1AfHIQi>

## LOCAL CONFLICT AND COMMUNITY DEVELOPMENT IN INDONESIA: ASSESSING THE IMPACT OF THE KECAMATAN DEVELOPMENT PROGRAM

**Patrick Barron, Rachel Diprose, Michael Woolcock**

Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

Tidak bisa dipungkiri bahwa proyek-proyek pembangunan akan selalu diiringi konflik, karena pembangunan pada dasarnya adalah sebuah proses politik dan kontestasi. Studi ini mengkaji berbagai pertanyaan terkait proyek pembangunan dan berbagai bentuk konflik lokal dengan menelaah bagaimana PPK berinteraksi dengan ketegangan sosial dan konflik lokal, dan bagaimana hal itu memengaruhi sifat dan lingkup manajemen konflik lokal. Apa saja kekuatan dan keterbatasan proyek seperti PPK di lingkungan sosial dan politik yang tidak stabil, di mana identitas, aturan, dan hubungan kelompok sedang ditata ulang, di mana ketidakpuasan lama sekarang memiliki ruang untuk muncul ke permukaan, dan di mana akses pada kekuasaan sedang dinegosiasi ulang? Dapatkah intervensi dari luar, seperti PPK, mendukung perubahan sosial yang progresif dalam lingkungan yang dinamis seperti ini? Jika demikian, bagaimana? Hasil dari kajian ini menggarisbawahi beberapa poin penting, diantaranya:

- Forum PPK, fasilitator, dan mekanisme pengaduan dapat menangani konflik yang berkaitan dengan program, namun PPK memiliki dampak yang kecil pada konflik secara keseluruhan atau pada konflik yang tidak berhubungan dengan proyek.
- Menjaga jarak dari konflik memungkinkan PPK untuk tetap menjadi ruang yang netral secara politis.
- Konflik non-proyek yang ditangani melalui PPK cenderung dapat diatasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa potensi PPK untuk memainkan peran mediasi yang lebih besar, khususnya untuk sengketa yang terkait dengan pembangunan.
- PPK membantu meningkatkan hubungan antar kelompok dan antara negara dengan masyarakat, yang membuat daerah menjadi lebih tahan terhadap konflik berkekerasan.
- Hasil survei menunjukkan adanya persepsi bahwa ada perbaikan dalam penanganan sengketa serta kerja lapangan secara kualitatif menunjukkan adanya hubungan antara program dengan perubahan normatif. Sehingga PPK (ketika berfungsi dengan baik) dapat menciptakan preseden yang positif, mendorong permintaan untuk perubahan dalam pengambilan keputusan dan resolusi konflik lokal.
- Dampak PPK ini berbeda-beda sesuai dengan variasi konteks politik, budaya, kelembagaan, dan ekonomi.
- Program-program pembangunan harus siap untuk menangani konflik yang menyertainya.

Laporan ini merekomendasikan untuk menyikapi konflik yang melekat dalam intervensi pembangunan secara eksplisit, dan menjadikan potensi konflik sebagai pertimbangan baik dalam perencanaan maupun implementasi. Proyek harus didasarkan pada pengetahuan yang rinci tentang konteks di mana proyek akan berjalan agar tidak memicu konflik tanpa sengaja. Sosialisasi harus dilakukan secara komprehensif dan terus menerus, pemantauan pun harus ketat, dan pengaduan harus ditangani. Baik pemimpin pemerintah maupun pemimpin informal harus melekat dengan proses ini. Dalam situasi konflik, para pelaku terkait harus dilibatkan dalam cara yang sesuai dengan kebiasaan setempat (sejauh mana itu memungkinkan).

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=970>

<http://bit.ly/1HnTBES>



### Proyek:

PPK

### Lokasi Studi:

Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur

### Metodologi:

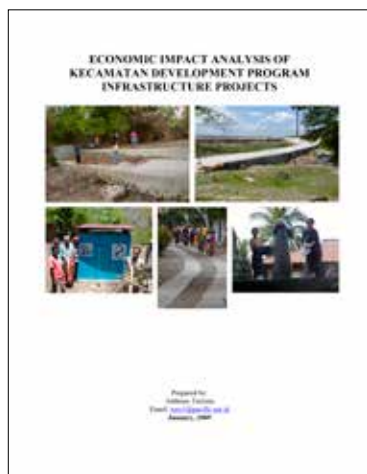
Campuran

### Bahasa:

Inggris

### Kata Kunci:

Resolusi konflik, fasilitator

**Proyek:**

PPK/Bank Dunia

**Lokasi Studi:**

Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan

**Metodologi:**

Kuantitatif

**Bahasa:**

Inggris, Indonesia

**Kata Kunci:**

Infrastruktur perdesaan, pemeliharaan, fasilitator teknis

## ***ECONOMIC IMPACT ANALYSIS OF KECAMATAN DEVELOPMENT PROGRAM INFRASTRUCTURE PROJECTS***

**Anthony Torrens**

Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

Studi independen ini ditugaskan oleh Bank Dunia untuk meneliti dampak ekonomi dari 113 proyek infrastruktur perdesaan dari program PPK, dengan fokus pada jalanan, jembatan, pasokan air, dan saluran irigasi, yang mana merupakan empat jenis infrastruktur yang paling sering diminta oleh desa-desa PPK di seluruh Indonesia. Studi ini menemukan bahwa:

- Tingkat Pengembalian Internal Ekonomi (*Economic Internal Rate of Return*, EIRR) dari infrastruktur yang dibangun pada empat provinsi, rata-rata sebesar 52,7%.
- PPK menyelesaikan proyek, rata-rata dengan biaya 55,82% dari biaya kontrak yang dilakukan oleh pemerintah.
- 106 dari 113 proyek dinilai dengan kondisi Baik atau Sangat Baik secara teknis.
- Biaya operasional dan pemeliharaan selalu diestimasi kurang, dan di luar kemampuan desa untuk menanggung biaya tersebut.
- Fasilitator teknis telah meningkatkan kualitas dan akurasi proposal secara signifikan, dan mampu mengatasi berbagai masalah dengan proyek-proyek sebelumnya.

Walaupun laporan ini mengingatkan bahwa beberapa angka tampak sangat tinggi, interpretasi yang paling konservatif pun akan membenarkan bahwa PPK telah menghasilkan pengembalian investasi yang substansial dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada yang dapat ditawarkan oleh kontraktor pemerintah.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=22>

**Versi Bahasa Indonesia:**

Analisis Dampak Ekonomi Pasca-Konstruksi Program Prasarana Desa PPK: Laporan Akhir: Ringkasan Eksekutif Januari 2005

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=3414>



## LAPORAN AKHIR EVALUASI KUALITAS PRASARANA PPK SIKLUS IV

**National Management Consultants dan Sekretariat Program Pengembangan Kecamatan**

Diterbitkan Oleh: Sekretariat PPK – Bank Dunia, Jakarta

Studi ini mengevaluasi kualitas infrastruktur dalam sampel desa-desa yang telah menyelesaikan pembangunan tahun pertama PPK Tahap II, yang meliputi kualitas teknis dan berbagai indikator lainnya, termasuk manajemen proyek, peran masyarakat, pemeliharaan, dan pendapat masyarakat tentang PPK. Laporan ini menemukan bahwa:

- 11,99% dari tenaga kerja infrastruktur PPK adalah perempuan.
- Membutuhkan rata-rata 3,75 bulan untuk menyelesaikan proyek.
- 84% dari desa yang disurvei memiliki anggaran proyek dan gambar teknis dan 16%-nya tidak memiliki data yang dimaksud. Hanya sedikit dari dokumen-dokumen tersebut disimpan di tempat yang dapat diakses oleh publik.
- Tidak ditemukan proyek PPK yang membahayakan lingkungan secara serius. Sebagian besar netral, hanya 6% mengakibatkan kerusakan lingkungan ringan, dan hampir 10% bermanfaat bagi lingkungan.
- Hampir 5% dari kasus akusisi tanah dilakukan secara kurang benar, terkadang mengarah kepada konflik serius.
- Hanya 38% dari desa sampel survei, memiliki kelompok pemeliharaan yang berfungsi dengan baik.
- Pejabat dan pemimpin non-formal, secara signifikan melebih-lebihkan pelaporan atas manfaat yang diterima dan mengurangi pelaporan terkait masalah dengan PPK.
- Lebih kecil kemungkinannya bagi kaum muda dan ibu rumah tangga untuk bekerja dalam proyek PPK, merasa puas dengan upah yang diberikan dalam proyek PPK, turut berpartisipasi dalam perencanaan, atau mengetahui anggaran PPK.

Laporan ini merekomendasikan agar fasilitator kabupaten menerima pelatihan wajib selama pelayanan (*in-service training*), dan melatih fasilitator kecamatan setelah itu. Pelatihan ini harus mencakup persyaratan program untuk akuisisi tanah dan aset, perintah perubahan, definisi berbagai istilah seperti “tenaga kerja” dan “orang per hari kerja,” dan kemampuan untuk mendokumentasikan data tersebut dengan benar. NMC perlu mengembangkan metode tambahan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dan pemuda dalam program.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=2073>

### Versi Bahasa Inggris:

*Final Report: Evaluation of Infrastructure Quality PPK Cycle IV* <http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=3104>



### Proyek:

PPK

### Lokasi Studi:

Sampel seluruh Indonesia

### Metodologi:

Kuantitatif

### Bahasa:

Inggris, Indonesia

### Kata Kunci:

Pemerintah daerah, pemeliharaan, infrastruktur perdesaan, transparansi

## PPK2 MATCHING GRANT STUDY LOCAL GOVERNMENT

Paul Adams

Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

Tahap kedua PPK (2003-2006) mencakup skema *Matching Grant* (dana program yang dialokasikan oleh pemerintah daerah), yang dirancang untuk mendorong pemerintah kabupaten untuk menambah dana PPK dengan dana mereka sendiri. Di bawah skema tersebut, kabupaten yang mendanai kecamatan tambahan untuk bergabung dalam program PPK akan menerima bantuan teknis tambahan tanpa biaya dalam bentuk pelatihan dan fasilitasi melalui konsultan proyek PPK. Pada tahun 2003, 79 dari 190 kabupaten yang berpartisipasi dalam PPK telah berjanji untuk menyediakan *Matching Grants*, memperluas PPK ke 150 kecamatan tambahan.

Studi ini melihat faktor-faktor apa yang mendorong pemerintah kabupaten untuk bergabung atau tidak dalam program tersebut, dan permasalahan — baik dengan proyek maupun dengan pemerintah — yang membuat skema *Matching Grants* kurang efektif daripada yang seharusnya. Temuan utama meliputi beberapa hal dibawah ini:

- Kabupaten yang berpartisipasi, termotivasi oleh dua hal, yaitu: kesadaran bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat mengurangi biaya, dan juga keinginan untuk meningkatkan pamornya di hadapan pemerintah pusat.
- Tawaran bantuan teknis tanpa biaya dan fasilitasi tidak berhasil memikat lebih banyak kabupaten untuk ikut serta.
- Kementerian yang bersaing untuk anggaran terbatas tidak bersedia dalam menyerahkan dananya untuk skema *Matching Grants*.
- Kontribusi kabupaten umumnya kecil, rata-rata 1,2% dari anggaran pembangunan.
- Pemerintah kabupaten tidak mau menyerahkan peran atau fungsi kepada konsultan atau tingkatan yang lebih tinggi.
- Pada kabupaten yang tidak memiliki "*champion*" untuk program tersebut, ada banyak kepentingan-kepentingan lain (misalnya: DPRD, dan instansi terkait) yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan *matching grants*.
- Kendala terbesar berasal dari sistem birokrasi yang rumit dan kurang efisien ditambah terbatasnya penyebaran informasi antar lembaga pemerintahan.
- Para pejabat mengikuti peraturan dengan sangat harafiah, bahkan ketika peraturan tersebut secara jelas tidak sejalan dengan kepentingan terbaik bagi program.
- PPK belum diselaraskan dengan jadwal pencairan dana pemerintah.

Laporan ini merekomendasikan langkah-langkah untuk membantu para pejabat lini kedua dan kantor kementerian setempat untuk "ikut" dalam PPK. Sosialisasi tertarget, pelatihan, dan peran yang jelas bagi semua yang tugasnya bersentuhan dengan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Arus informasi dari "kampiun" kepada DPRD perlu ditingkatkan, dapat berupa buletin berkala dan lokakarya. PPK juga harus diselaraskan dengan tahun anggaran Indonesia.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=3108>

### PPK2 MATCHING GRANT STUDY

#### EXECUTIVE SUMMARY

During the first phase of PPK which ran from 1996 to 2002, the program was largely independent of local governments. Although officials played a role in coordination and oversight, most of capital and construction costs were borne by the central government and local governments had no responsibility for planning, financing, or implementation. This approach, while it was successful in getting the program started, did not address the need for local governments to take ownership of the program and to be able to sustain it.

In the longer term, however, the relative independence of government may neither maintain nor develop momentum in light of Indonesia's rapid demographic and decentralization following the desire of President Suharto and the "Big Bang" decentralization of 2001. To meet these needs, PPK designed this study to determine the feasibility of participating in local officials. This strategy was with one reason. As noted in the first report for this phase, some officials expressed signs of being in PPK programs, as evidenced by the progress of local officials to new PPK in several for other development programs.

For each "rolling up" of PPK principles was still hampered by limitations on the role of officials and the lack of a clear financial role on the part of local governments. The second phase of PPK which began in 2003, took the first steps to address these issues. First in the role of the program, local governments were invited to participate in a "matching grant" scheme, which enabled them to share the costs of the program with the central government. All other aspects of the program remained the same. Facilitators were still centrally located and central PPK roles and responsibilities were still defined. Many of the officials had not received the first phase of PPK and were not participating, providing a challenge to the second phase of PPK.

This paper seeks to understand other potential local governments to contribute to PPK and the progress by which they did so. It also attempts to determine the impact that this had on village and development as well as on the of the administrative costs faced by the program in a wider context with local government procedures. Much of the study focuses on the executive branch of district governments. These were those agencies, officials played a key role in deciding whether to contribute to PPK and, accordingly, which steps to take in the operational phase. The study is based on a survey of PPK committees and local planning and implementation agencies heads in 15 districts, as well as multiple interviews in 11 districts with local PPK officials, legislators and consultants. Informants included officials and members of local legislatures, district heads, local agencies and committees, heads and members of district agencies, and district project managers (PPMs). District committees and incentive facilities.

#### 1. INTRODUCTION

The study provides some evidence of how to in PPK also, principles and procedures among local government officials. These agencies still involved in the mission of the program to meet some planning and district heads. In general, officials strongly identified with the program objectives and role of PPK. They also continued to follow up "companion" approach as a way to coordinate with and within government. In other words, in providing the development that stood in contrast to previous top-down programs, which have not been created differently and have not succeeded.

### Proyek:

PPK

### Lokasi Studi:

Sampel seluruh Indonesia

### Metodologi:

Kualitatif

### Bahasa:

Inggris

### Kata Kunci:

Pemerintah lokal

## AN ANALYSIS OF EFFORTS TO REPLICATE THE KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT

**Nurlily Basri, Siti Barokah, Carolina Monterio, Kevin Beattie**

Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

Pemerintah daerah di beberapa wilayah di Indonesia telah memulai proyek replikasi PPK atau "*spin-off*" yang didanai melalui anggaran mereka sendiri. Studi ini menelaah sepuluh skema replikasi PPK secara lebih mendalam, menilai penerapan prinsip-prinsip PPK dan fitur program, serta menggali lebih dalam tentang bagaimana PPK dapat memengaruhi tata kelola daerah, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan penyampaian layanan. Hasil temuan dari studi ini menggarisbawahi beberapa poin dibawah ini:

- *Spin-off* dari pemerintah daerah tidak menargetkan masyarakat miskin atau kelompok perempuan.
- Kontribusi desa cenderung sangat tinggi, dari 10% sampai hampir 60%.
- *Spin-off* dari pemerintah daerah umumnya tidak mencakup persaingan antar desa.
- Manajemen keuangan sangat buruk, dan tingkat transparansi rendah.
- Kebanyakan *spin-off* tidak memiliki mekanisme pengaduan formal.
- Tidak ada yang menekankan pemeliharaan, perencanaan jangka panjang, atau keberlanjutan.
- Tidak ada yang memiliki strategi anti-korupsi.

Studi ini merekomendasikan untuk mempelajari *spin-off* ini secara lebih mendalam, dan pada akhirnya terlibat dalam proyek replikasi ini, terutama melalui pelatihan-pelatihan, seperti: teknik fasilitasi, pembukuan, pengawasan keuangan dan langkah-langkah akuntabilitas, meninjau praktik yang baik dan buruk, dan mendorong "pembelajaran horizontal." PPK juga harus membantu program-program *spin-off* untuk menyelaraskan siklus mereka dengan alokasi hibah dan tahun anggaran pemerintah daerah. Studi-studi ini juga harus membandingkan *spin-off* lokal dengan PPK, mencari inovasi dan efisiensi.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=2027>

A Report on KDP Mandate: An Analysis of Efforts to Replicate the Kecamatan Development Program

Commissioned by The World Bank, September 2004

Authors: Nurlily Basri, PPK Special Study Specialist  
Siti Barokah, PPK Case Studies and Monitoring Specialist  
Carolina Monterio, Consultant  
Kevin Beattie, Consultant

### Proyek:

PPK

### Lokasi Studi:

Jawa Timur, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, Aceh, Nusa Tenggara Timur

### Metodologi:

Kualitatif

### Bahasa:

Inggris

### Kata Kunci:

Gender, perempuan, kelompok marginal, inklusi, partisipasi, korupsi, pemeliharaan, kompetisi

**Proyek:**

PPK

**Bahasa:**

Inggris

**Kata Kunci:**

Peningkatan skala, desentralisasi, manajemen keuangan, konflik, tata kelola

## INDONESIA'S KECAMATAN DEVELOPMENT PROGRAM: A LARGE-SCALE USE OF COMMUNITY DEVELOPMENT TO REDUCE POVERTY

**Scott Guggenheim, Tatag Wiranto, Yogana Prasta, Susan Wong**  
Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

Pertama dipresentasikan pada konferensi yang bertajuk "*Scaling Up Poverty Reduction*," yang diselenggarakan di Shanghai 25-27 Mei 2004, makalah ini memaparkan pertumbuhan program PPK yang sangat pesat, keberhasilan dan tantangan program, serta menawarkan pembelajaran untuk proyek pembangunan berbasis masyarakat skala besar di negara-negara lain. Pokok-pokok utama dari makalah ini meliputi:

- Peningkatan skala program PPK memerlukan adanya usaha untuk mengatasi berbagai kendala yang ada pada Bank Dunia dan prosedur pemerintah, contohnya:
  - o Merancang sistem fidusia dengan kontrol yang memadai tanpa menyebabkan adanya penundaan yang lama pada proyeknya.
  - o Sistem transfer PPK memungkinkan sangat sedikit diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
- Bukti awal menengarai bahwa desain inti program PPK berjalan dengan baik di negara-negara pasca konflik dan sedang mengalami proses transisi.
- PPK menawarkan cara yang efisien dalam efektivitas biaya untuk menyediakan sejumlah besar infrastruktur desa yang berbiaya rendah dan berteknologi rendah. Khususnya yang berhubungan dengan tautan antara daerah pertanian dan pasar pada daerah yang sangat luas.
- Sistem transfer fiskal Indonesia seringkali sangat lamban, sampai sebanyak sembilan bulan pada satu tahun anggaran dapat hilang karena penundaan. Sistem pencairan PPK jarang membutuhkan waktu lebih dari satu bulan.
- Bukti survei awal menengarai bahwa desa-desa yang telah melalui PPK, menunjukkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah yang lebih tinggi secara signifikan.
- Biaya manajemen untuk program PPK secara keseluruhan lebih tinggi daripada alokasi biaya untuk pengawasan standar Bank Dunia, yaitu sekitar 15-20%, yang sebagian besar disebabkan oleh ukuran PPK yang tidak biasa.
- Aturan dan tanggung jawab terus berubah sehingga menyulitkan buku aturan proyek untuk terus mengikuti perubahan tersebut setiap saat.
- PPK tidak berguna untuk investasi yang memiliki biaya berulang, koordinasi lintas investasi, atau kegiatan yang sulit secara teknis.

Laporan ini menekankan bahwa PPK tidak menggantikan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih luas. Mendorong pertumbuhan lokal memerlukan lebih banyak perhatian pada skema insentif yang mendukung investasi, lapangan kerja, dan mobilisasi sumber daya lokal. PPK dapat berkontribusi pada strategi kemiskinan semacam ini, tetapi program ini tidak menggantikan kebutuhan akan program aksi yang berbasis lebih luas. Kepemilikan pemerintah harus ditingkatkan, namun pada saat yang sama kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan dan mengelola dana tidak boleh hilang dalam derasnya arus untuk meningkatkan kepemilikan pemerintah. Sementara generasi pertama PPK berperan, terutama untuk memperkenalkan mekanisme perencanaan dan pengelolaan pembangunan masyarakat, generasi mendatang dapat dan harus membangun kembali hubungan ke struktur perencanaan pemerintah yang lebih formal.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=3115>

## **MONITORING CORRUPTION: EVIDENCE FROM A FIELD EXPERIMENT IN INDONESIA (NBER WORKING PAPER NO. 11753)**

**Benjamin A. Olken**

Diterbitkan Oleh: National Bureau of Economic Research,  
Cambridge

Makalah ini menggunakan uji coba lapangan acak untuk menelaah beberapa pendekatan dalam mengurangi korupsi. Penulis mengukur korupsi di lebih dari 600 proyek jalan desa di Indonesia dengan meminta para insinyur secara independen untuk memperkirakan harga dan jumlah seluruh input yang digunakan untuk setiap jalan, yang kemudian dibandingkan dengan laporan pengeluaran resmi desa. Temuan utama meliputi beberapa hal dibawah ini:

- Mengumumkan peningkatan kemungkinan audit yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan penurunan pencurian material sebesar 8%.
- Audit terbukti efektif dari segi biaya, menghasilkan penghematan yang cukup untuk menutupi biaya tambahan yang timbul.
- Meningkatkan pengawasan masyarakat dapat mengurangi pencurian upah, tetapi penghematan tersebut dinafikan oleh peningkatan pencurian bahan.
- Pemantauan masyarakat hanya dapat bekerja untuk barang pribadi saja, dan bukan untuk sarana umum.
- Menyampaikan saran dan komentar secara tertulis dapat menggantikan kehadiran di musyawarah.

Meskipun makalah ini menggunakan pengukuran korupsi aktual, sebagian besar peneliti terpaksa menggunakan data tentang persepsi masyarakat tentang korupsi, bukan pengukuran langsung. Kerja di masa yang akan datang dapat membandingkan persepsi atas korupsi dengan korupsi aktual untuk menelusuri hubungan antara persepsi dengan realita.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=25>

<http://www.nber.org/papers/w11753>



### **Proyek:**

PPK

### **Lokasi Studi:**

Sampel seluruh Indonesia

### **Metodologi:**

Kuantitatif

### **Bahasa:**

Inggris

### **Kata Kunci:**

Korupsi, audit, pemantauan masyarakat, akuntabilitas sosial



## ***INDONESIA KECAMATAN DEVELOPMENT PROGRAM: BUILDING A MONITORING AND EVALUATION SYSTEM FOR A LARGE-SCALE COMMUNITY-DRIVEN DEVELOPMENT PROGRAM***

**Susan Wong**

Diterbitkan Oleh: EASIES Bank Dunia

Makalah ini menjelaskan tentang sistem pengawasan dan evaluasi yang dikembangkan untuk program PPK, termasuk di dalamnya penjelasan yang rinci tentang komponen-komponennya, bagaimana komponen tersebut dibangun dan dioperasionisasikan, serta tantangan yang dihadapi ketika menggabungkan kegiatan multi-segi ini ke dalam program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang besar.

Komponen utamanya adalah:

- Pemantauan lapangan dan pelaporan oleh pejabat pemerintah dan para konsultan
- Pengawasan partisipatif masyarakat, oleh BPD, OMS, dan kelompok masyarakat
- Studi kasus
- Dokumentasi pembelajaran yang diperoleh
- Pengawasan keuangan NMC dan unit pelatihan
- Prosedur untuk penanganan pengaduan dan keluhan
- Pengawasan LSM tingkat provinsi
- Pemantauan independen oleh wartawan
- Studi evaluasi dampak
- Evaluasi pinjaman
- Audit dan tinjauan keuangan

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=19>

<http://bit.ly/1zCg9et>

### **Proyek:**

PPK

### **Bahasa:**

Inggris

### **Kata Kunci:**

Pengawasan dan evaluasi,  
OMS



## MENINGKATKAN PARTISIPASI AKTIF PEREMPUAN: BELAJAR DARI PENGALAMAN

### PPK

Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

Buku ini disusun sebagai sumber yang sifatnya praktis bagi para fasilitator PPK setelah lokakarya tiga hari yang diselenggarakan di Bogor pada tahun 21-23 Maret 2002. Buku ini mencakup pembelajaran yang diambil dari pengalaman di lapangan, dan satu bagian tentang pengawasan dan evaluasi. Poin-poin penting meliputi:

- Undangan harus secara eksplisit menyertakan istri beserta suami
- Menetapkan target dapat membantu meningkatkan kehadiran
- Penjadwalan, lokasi, durasi, dan keteraturan pertemuan semuanya berpengaruh terhadap kehadiran perempuan
- Fasilitator perempuan memerlukan pelatihan dan dukungan ekstra
- Perempuan membutuhkan bantuan dalam mempertahankan usulan mereka pada proses terbuka
- Data indikator partisipasi kunci harus dikumpulkan dalam pertemuan, dengan cara melihat proposal, dan dengan memantau perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek PPK.

Buku ini ditutup dengan daftar “pertanyaan ahli” yang didapat dari pengalaman menyertakan perempuan dalam pembangunan berbasis masyarakat di negara-negara lain.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=27>

### Versi Bahasa Inggris:

*Enhancing Women's Participation: Learning from Field Experience*

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=5367>

<http://bit.ly/1J2F4jV>



### Proyek:

PPK

### Metodologi:

Kualitatif

### Bahasa:

Inggris, Bahasa Indonesia

### Kata Kunci:

Gender, perempuan, fasilitator, partisipasi

## DO WOMEN MAKE ANY DIFFERENCE? KDP1 GENDER DATA ANALYSIS: INTERIM REPORT

Susan Wong

Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

### DO WOMEN MAKE ANY DIFFERENCE? KDP1 GENDER DATA ANALYSIS: INTERIM REPORT

Susan Wong  
KDP Monitoring and Evaluation Advisor  
February 2002

#### 1. INTRODUCTION

The Kecamatan Development Program (KDP) is a Government of Indonesia program aimed at alleviating poverty in rural communities and improving local governance. KDP provides block grants of 150 million to one billion rupiah (150/100 to 150/1000) directly to Kecamatan and village for infrastructure, social and economic activities. KDP emphasizes the principles of community participation, especially for women and poor villages, villages: consultation for funds, and community. All KDP activities aim at allowing villages to make their own choice about the kinds of projects that they need and want.

Phase One of KDP began in August 1998 through a US\$ 700 million World Bank loan. The Program is currently in its third year of implementation. Phase Two of KDP will begin in mid-2002 and run for five years with an additional US\$ 625 million loan from the World Bank.

In upholding the principle of community participation especially for women and poor villages, KDP undertakes several initiatives to improve gender equity and increase women's participation. Among the initiatives undertaken were:

- Each participating village elects one male and one female village facilitator.
- For Year 1, two Kecamatan Facilitator (FK) accounts - one male, one female - were added to each Kecamatan to assist the FKs.
- The KDP Village meetings must include respected village leaders and representatives, at least one male and one woman from each participating village.
- One of the two proposals submitted to KDPs, at least one proposal must be from women's groups.
- Year 1 includes special separate meetings for women, men, groups, persons, to discuss and prepare women's proposals.
- A module on gender training was included in Year 2 for all consultants.
- During the planning, verification, and selection phases, female participation is a KDP major gender-disaggregated data on male and female participation in village and Kecamatan-level meetings, types of beneficiaries, women's proposals received and approved etc.
- KDP includes a special program for widows and orphans in vulnerable situations.

Makalah ini membahas dampak gender pada PPK Tahun 1, 2 dan 3 (1998-2001), termasuk jenis-jenis kegiatan yang diminta oleh kelompok-kelompok perempuan, dan apakah usulan dari kelompok perempuan lebih baik atau lebih buruk daripada usulan kelompok penerima manfaat lainnya. Makalah ini juga membahas efek dari prakarsa langkah afirmatif PPK untuk meningkatkan representasi perempuan. Apakah representasi telah menghasilkan pemberdayaan yang lebih besar sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi perempuan? Apa saja pengaruh, jika ada, kelompok perempuan dan fasilitator perempuan terhadap program ini?

- Kelompok-kelompok perempuan sangat banyak mengusulkan kegiatan ekonomi (sebanyak 74%) dibanding dengan kegiatan infrastruktur (sebesar 26%). Namun program ekonomi, yang memiliki anggaran dan dampak lebih kecil daripada program yang besar, terpengkas pada saat desa mengerucutkan proposal mereka.
- Keberadaan fasilitator perempuan tidak menghasilkan banyak perbedaan dalam jumlah, jenis, atau proporsi total proposal yang diajukan perempuan.
- Tidak ada perbedaan besar dalam tingkat keterpilihan antara proposal yang diajukan oleh laki-laki atau perempuan.
- Jenis kelamin dari fasilitator tidak berdampak pada kemungkinan terpilihnya usulan perempuan.
- Perekrut PPK mengklaim beberapa alasan mengapa mereka merasa punya kesulitan mendapatkan lebih banyak perempuan untuk menjadi fasilitator kecamatan (FK) dikarenakan oleh:
  - o kebanyakan perempuan enggan untuk melakukan perjalanan ke desa-desa atau daerah terpencil sendiri;
  - o perempuan kurang percaya diri dan lebih kecil kemungkinannya untuk melamar pekerjaan;
  - o perempuan memiliki lebih banyak tanggung jawab di dalam rumah yang mencegah mereka untuk bepergian.
- Perekrut PPK sering berasumsi bahwa masalah ini menjadikan fasilitator perempuan tidak sehandal fasilitator laki-laki. Pada praktiknya, tingkat pergantian fasilitator masih lebih tinggi untuk laki-laki daripada perempuan, dan tidak ada bukti bahwa perempuan "kurang dapat diandalkan" dibandingkan dengan laki-laki.
- Fasilitator perempuan tidak selalu lebih gigih mengadvokasi hak-hak perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

PPK1 menunjukkan bahwa langkah afirmatif yang berani sekali pun tidak serta-merta memberdayakan perempuan. Walau tidak terlihat pada data, perempuan secara konsisten melaporkan bahwa mereka merasa lebih nyaman mengekspresikan diri di depan fasilitator perempuan — dan pentingnya pemimpin dan teladan perempuan tidak boleh dianggap remeh.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=3110>

#### Proyek:

PPK

#### Metodologi:

Campuran

#### Bahasa:

Inggris

#### Kata Kunci:

Gender, perempuan, fasilitator, partisipasi, pemilihan proyek

## **KECAMATAN DEVELOPMENT PROGRAM (PPK) IN CONFLICT AREAS**

**Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kementerian Dalam Negeri (PMD-Kemendagri) dan National  
Management Consultant (NMC)**

Diterbitkan Oleh: Kementerian Dalam Negeri, Jakarta

Makalah ini berargumen bahwa PPK adalah instrumen berskala besar yang memungkinkan pemerintah untuk bekerja secara efektif di wilayah yang mengalami konflik sosial, seperti Aceh, Papua, Kalimantan Tengah, Poso di Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Maluku. Beberapa poin penting antara lain:

- PPK menyediakan kerangka yang berguna untuk negosiasi dan membangun konsensus.
- PPK memberi bantuan teknis dan keuangan yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ketika perselisihan timbul, PPK menemukan bahwa pelibatan warga desa dan masyarakat di awal adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah.

Laporan ini merekomendasikan untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat dan konsultan PPK, menekankan prinsip-prinsip fundamental partisipasi masyarakat dan transparansi, dan menjaga sikap apolitis dengan hati-hati. Mekanisme untuk diskusi terbuka dan pencapaian kesepakatan harus diperkuat sehingga pengaduan dapat dibahas dan diselesaikan sebelum kekerasan terjadi. Akhirnya, kunjungan lapangan oleh para menteri dan pejabat pemerintah lainnya akan menunjukkan dukungan pemerintah dan komitmen pada pembangunan dan pengentasan kemiskinan di daerah-daerah tersebut.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=1969>



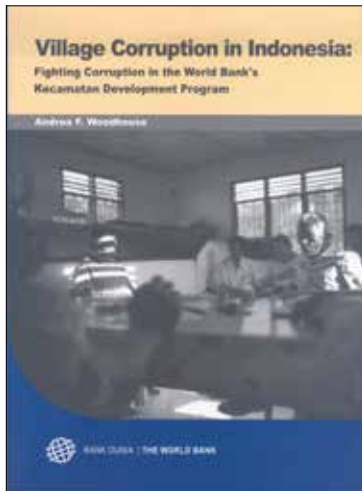
**Proyek:**  
PPK

**Lokasi Studi:**  
Aceh, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah

**Metodologi:**  
Campuran

**Bahasa:**  
Inggris

**Kata Kunci:**  
Resolusi konflik



## **VILLAGE CORRUPTION IN INDONESIA: FIGHTING CORRUPTION IN THE WORLD BANK'S KECAMATAN DEVELOPMENT PROGRAM**

**Andrea Woodhouse**

Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

Makalah ini membahas di mana, mengapa, dan bagaimana korupsi terjadi di dalam program PPK: bagaimana para pelaku memandang kepentingan mereka, apa yang menjadi motivasi mereka, apa jenis kendala yang mereka hadapi, dan apa saja langkah yang mereka ambil untuk menyelesaikan masalah. Makalah ini berargumen bahwa korupsi adalah masalah utama yang berkaitan dengan insentif yang dapat diperangi secara efektif hanya dengan mengubah biaya dan manfaat yang melekat pada perilaku yang korup. Makalah ini juga mengklaim bahwa konteks lokal dan norma-norma sosial merupakan kunci untuk memahami bagaimana insentif tersebut dapat diubah untuk mengurangi korupsi. Temuan utama meliputi:

- Korupsi di desa-desa Indonesia didorong oleh:
  - o Birokrasi dan prosedur yang berbelit-belit sehingga menciptakan peluang untuk perilaku *rent-seeking*.
  - o Sejarah impunitas bagi koruptor dan opresi bagi peniup peluit.
  - o Kekuatan elit desa, dengan sistem peradilan yang lemah dan korup, menghambat akses masyarakat miskin terhadap keadilan dan kendali atas pengambilan keputusan.
  - o Strategi yang disengaja hasil dari pemerintahan Suharto untuk mendepolitisasi desa.
  - o Penggunaan dana pembangunan untuk patronase dan kontrol.
- Kerumitan: semua pihak mungkin sudah bertangan kotor (berperilaku curang), termasuk mereka yang relatif tidak berdaya.
- Strategi anti-korupsi dalam program PPK dimulai dengan menempatkan informasi di tangan para peserta.
- Transparansi, partisipasi masyarakat, dan penyediaan jalur independen untuk penyelesaian pengaduan membantu dalam memangkas korupsi di PPK.
- Fasilitator memberikan informasi secara independen dari pemerintah daerah, dan memiliki perlindungan lebih dari ancaman dan intimidasi dibandingkan dengan warga desa biasa.
- Penting untuk mengidentifikasi pemimpin yang bersih dan mencoba untuk melibatkan mereka dalam perang melawan korupsi.

Makalah ini merekomendasikan perubahan sistem insentif dasar bagi para pelaku PPK, termasuk menurunkan potensi biaya peniupan peluit. Monopoli harus dibatasi, diskresi berbagai pelaku harus diklarifikasi, dan akuntabilitas harus ditingkatkan untuk proyek secara keseluruhan. Staf PPK harus menerima pelatihan yang lebih baik, terutama dalam berbagi informasi dan transparansi. Strategi di masa depan juga harus mempertimbangkan konteks setempat.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=220>

### **Proyek:**

PPK

### **Metodologi:**

Kualitatif

### **Bahasa:**

Inggris

### **Kata Kunci:**

Korupsi, fasilitator, akses terhadap keadilan, arus informasi

## REVIEW OF THE PPK MICROCREDIT APPROACH

**Detlev Holloh**

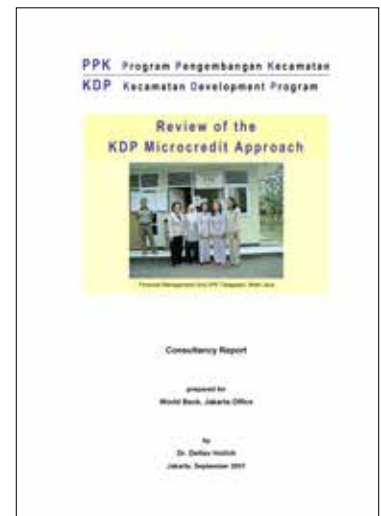
Diterbitkan Oleh: World Bank Group, Washington DC

Laporan ini mengkaji sistem kredit mikro PPK yang terkini dalam menghasilkan rekomendasi untuk PPK Tahap 2, yang berlangsung antara bulan Januari 2002 dan Juni 2006. Tinjauan ini berfokus pada sisi pasokan sistem kredit mikro PPK, mengandaikan bahwa jika manajemen kredit dan layanan tidak benar, pinjaman mungkin tidak akan menghasilkan dampak yang diharapkan. Laporan ini menemukan bahwa:

- Perencanaan partisipatif tidak kompatibel dengan pengelolaan kredit dan dana bergulir.
- Dana bergulir di tingkat desa mungkin tidak layak: “desa bukanlah tempat integrasi dan kontrol sosial.”
- Kompetisi desa dan keterlibatan dewan dan forum belum meningkatkan kinerja atau penjangkauan.
- Alasan sistemik bagi kinerja yang buruk adalah:
  - o Pengelolaan keuangan yang buruk
  - o Persepsi tentang kredit sebagai hibah
  - o Korupsi
  - o Kurangnya pengalaman pada semua tingkatan.
- Beberapa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bekerja dengan baik, beberapa memiliki potensi namun membutuhkan bantuan, sebagian besar tampaknya tidak giat — namun PPK tidak memiliki data untuk membedakan mana yang membutuhkan bantuan dan yang tidak.
- Tidak realistis untuk mendorong hubungan dengan Badan Perkreditan Rakyat (BPR) di luar Jawa karena langkanya BPR perdesaan. Bahkan di Bali dan Jawa sekalipun di mana BPR lebih umum, mereka tidak memiliki penyuluhan di tingkat desa.

Laporan ini menyimpulkan bahwa PPK harus mengubah pendekatan atau berhenti memberikan kredit mikro. Jika program ini terus berlanjut, perlu pendekatan perencanaan yang berorientasi pada tujuan dan hasil. Agar kredit mikro bisa layak, pinjaman harus dikaitkan dengan tabungan, yang tidak disediakan oleh program saat ini. Kredit harus dikelola oleh pegawai yang terlatih dalam mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan serta dijaga agar sepenuhnya terpisah dari kegiatan pembuatan hibah PPK.

<http://psflibrary.org/collection/detail.php?id=2071>



### Proyek:

PPK

### Lokasi Studi:

Yogyakarta, Lampung, Jawa Barat

### Metodologi:

Campuran

### Bahasa:

Inggris

### Kata Kunci:

Penghidupan, kredit mikro, UPK, manajemen keuangan

# INDEKS

## Judul

<i>An Analysis of Efforts to Replicate the Kecamatan Development Project</i>	59	<i>Indonesia Urban Poverty Analysis and Program Review</i>	24
<i>Community-Based Reintegration in Aceh: Assessing the Impacts of BRA-KDP</i>	42	<i>Infrastruktur PNPM Mandiri Perdesaan Laporan Evaluasi Teknis 2012: Laporan Akhir Temuan dan Rekomendasi</i>	25
<i>Consolidated Assessment of UPK Revolving Loan Funds in Indonesia</i>	21	<i>Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur: Bukti dari Pedesaan Indonesia</i>	41
<i>Crises and Contradictions: Understanding the Origins of a Community Development Project in Indonesia*</i>	53	<i>Kecamatan Development Program (PPK) in Conflict Areas</i>	65
<i>Delivering Assistance to Conflict-Affected Communities: The BRA-KDP Program in Aceh</i>	43	<i>Kecamatan Development Program Qualitative Impact Evaluation</i>	51
<i>Direct Democracy and Local Public Goods: Evidence from a Field Experiment in Indonesia (NBER Working Paper No. 14123)</i>	45	<i>Kelompok Marjinal dalam PNPM-Perdesaan</i>	39
<i>Do Women Make Any Difference? KDP1 Gender Data Analysis: Interim Report</i>	64	<i>Laporan Akhir Evaluasi Kualitas Prasarana PPK Siklus IV</i>	57
<i>Economic Impact Analysis of Kecamatan Development Program Infrastructure Projects</i>	56	<i>Laporan Final Evaluasi PNPM-RESPEK: Infrastruktur Pedesaan dan Kapasitas Kelembagaan</i>	32
<i>Evaluasi Dampak PNPM Perdesaan</i>	29	<i>Laporan Penelitian Studi Kualitatif Dampak PNPM Perdesaan: Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara</i>	31
<i>Evaluasi Hasil: Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan melalui Investasi PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM Green) – Analisis Pengidupan Pedesaan</i>	19	<i>Lessons Learned from SPADA Planning and Service Delivery</i>	33
<i>Evaluasi Proses dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Perkotaan (Process Evaluation of PNPM Urban)</i>	37	<i>Local Conflict and Community Development in Indonesia: Assessing the Impact of the Kecamatan Development Program</i>	55
<i>Evaluation of the Village Financial Assistance Program (Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong, BKPG) di Provinsi Aceh</i>	4	<i>Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berbasis Masyarakat ke Dalam Kebijakan: Dari PNPM Mandiri menjadi UU Desa</i>	6
<i>Expanding and Diversifying Indonesia's Program for Community Empowerment, 2007-2012</i>	8	<i>Meningkatkan Partisipasi Aktif Perempuan: Belajar dari Pengalaman</i>	63
<i>Gender Inclusion Strategies in PNPM9</i>		<i>Micro Credit Strategy Formulation Mission for the National Community Empowerment Program or Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)</i>	47
<i>Gender in Community Driven Development Project: Implications for PNPM Strategy</i>	50	<i>Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia (NBER Working Paper No. 11753)</i>	61
<i>Governance Review of PNPM Rural: Community Level Analysis</i>	22	<i>Operation and Maintenance Overview for Program Pengembangan Kecamatan (PPK) and Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM): To Assess the Operation and Maintenance of PPK and PNPM Implemented Micro-Infrastructure Projects in Indonesia between 1999 and 2007</i>	44
<i>Impact Evaluation of the Second Phase of the Kecamatan Development Program in Indonesia</i>	46	<i>Opportunities and Approaches for Better Nutrition Outcomes through PNPM Generasi</i>	18
<i>Improving Management of PNPM</i>	23	<i>Pembelajaran dari Program P2SPP/PNPM Integrasi di Enam Kabupaten (P2SPP/PNPM Integration Lessons Learned Study in Six Districts)</i>	35
<i>Indonesia: Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Perkotaan</i>	16	<i>PNPM Gender Study 2012: Increasing the Quality of Women's Participation</i>	26
<i>Indonesia Kecamatan Development Program: Building a Monitoring and Evaluation System for a Large-Scale Community-Driven Development Program</i>	62	<i>PNPM Peduli Satu Tahun Berjalan: Evaluasi Independen Atas Hasil Pembelajaran (Oktober 2012)</i>	27
<i>Indonesia: Kemiskinan Perkotaan dan Ulasan Program</i>	17	<i>PPK2 Matching Grant Study Local Government</i>	58
<i>Indonesian Village Health Institutions: A Diagnostic</i>	13	<i>Rapid Appraisal of PNPM Neighborhood Development (and Poverty Alleviation Partnership Grant Mechanism)</i>	30
<i>Indonesia's Kecamatan Development Program: A Large-Scale Use of Community Development to Reduce Poverty</i>	60	<i>Review of the PPK Microcredit Approach</i>	67
<i>Indonesia's PNPM Generasi Program: Final Impact Evaluation Report</i>	38		



*Sensus Infrastruktur: Laporan tentang Kesiapan Suplai Infrastruktur di Indonesia – Capaian dan Kesenjangan yang Masih Terjadi* 10

*Should Aid Reward Performance?: Evidence from a Field Experiment on Health and Education in Indonesia (NBER Working Paper No. 17892)* 20

*Studi Kelembagaan Tingkat Lokal Ke-3: Laporan Akhir* 11

*Studi Kelompok Masyarakat PNPM* 15

*Studi Kualitatif Proliferasi dan Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat* 12

*Studi Pembelajaran dan Pemanfaatan Pro-Poor Planning, Budgeting and Monitoring (P3BM) Kajian Singkat di Sembilan Kabupaten* 34

*Survei Desa Aceh 2006: Evaluasi Keadaan Prasarana dan Sosial Desa* 49

*The Employment and Poverty Impact of PNPM* 52

*Village Corruption in Indonesia: Fighting Corruption in the World Bank's Kecamatan Development Program* 66

## Kata Kunci

advokasi 13

akses 10

akses terhadap keadilan 66

akuntabilitas 6, 22, 31

akuntabilitas sosial 61

APBN 33

arus informasi 22, 66

asisten persalinan tradisional 18

audit 37, 61

bidan 13

Bidan 18

BPD 15

dampak 52

Dampak 31

dampak pengiring 15

Dampak pengiring 8

dana pinjaman bergulir 47

Dana Pinjaman Bergulir 21

Data 13

database 34

desentralisasi 53, 60

DPRD 33, 35

eksklusi 39

eksperimen acak terkontrol (RCT) 20

elite capture 18, 32, 39, 51

fasilitator 12, 16, 19, 23, 32, 35, 39, 50, 55, 63, 64, 66

Fasilitator 15

fasilitator teknis 25, 56

gender 26, 51

Gender 50, 59, 63, 64

informasi 13

Infrastruktur 10

Infrastruktur desa 32, 41

infrastruktur perdesaan 25, 29, 49, 57

Infrastruktur perdesaan 44, 56

infrastruktur perkotaan 30

inklusi 26, 59

insentif 38

Insentif 20

Jender 4

kapasitas lokal 11

keberlanjutan 21

Keberlanjutan 19

kelembagaan desa 11, 15

Kelembagaan desa 51

kelompok marginal 59

kelompok marjinal 27, 29, 39, 50

Kemendagri 23

kemiskinan 31, 46, 52

Kemiskinan 29, 39

Kemiskinan perkotaan 16, 17, 24, 30, 37

kepala desa 11

kepuasan 45

kesehatan 10, 20

Kesehatan 38

Ketenagakerjaan 52

keterpaduan sosial 42

kompetisi 51, 59

konflik 43, 60

Konflik 42, 49

Konsumsi 46

Konteks sejarah 53

korupsi 21, 22, 23, 33, 59

Korupsi 61, 66

kredit mikro 52, 67

Kredit mikro 47

krisis moneter di Asia Tenggara 53

kuantitatif 45

layanan garis depan 10, 12

limpahan 51

LSM 8, 11, 12, 13

malnutrisi 18

manajemen 8

manajemen keuangan 6, 21, 60, 67

mantan gerilyawan 43

masalah pertanahan 25

modal sosial 53

OMS 27, 62

Orde Baru 53

organisasi masyarakat madani 11

partisipasi 4, 9, 26, 31, 32, 43, 59, 63, 64

pelaporan 12

pelayanan 33

pelayanan garis depan 18

pelayanan kesehatan 18

pemanfaatan 32

pemantauan masyarakat 61

pemberdayaan 39

pemeliharaan 41, 44, 56, 57, 59

Pemeliharaan 25

pemerintahan 29, 51

Pemerintah daerah 57

Pemerintah lokal 58

pemetaan kemiskinan 34  
 pemilihan proyek 45, 64  
 pemungutan suara 45  
 penargetan 16, 17, 24, 34, 37  
 Penargetan 43  
 pendidikan 10, 20, 38  
 penganggaran 20, 34  
 penganggaran online 23  
 pengangguran 46  
 pengarusutamaan 9  
 pengawasan 22  
 Pengawasan dan evaluasi 62  
 pengawasan masyarakat 32  
 pengelolaan sumber daya alam 19  
 penghidupan 19, 27, 43  
 Penghidupan 67  
 pengungsi domestik (IDP) 49  
 peningkatan (scale up) 8  
 Peningkatan skala 60  
 penundaan 23  
 perempuan 50, 51, 59, 63, 64  
 Perempuan 9, 26  
 perempuan kepala keluarga 4  
 perencanaan 12, 34, 41  
 Perencanaan 33, 35  
 perencanaan kota 17  
 Perencanaan partisipatif, UU Desa 2014 6  
 perencanaan tata ruang 30  
 perlindungan sosial 17  
 plebisit 4  
 Plebisit 45  
 PMD 23  
 posyandu 13, 18  
 pro-poor 34  
 puskesmas 13  
 reintegrasi 42  
 representasi 6, 16, 45, 51  
 Resolusi konflik 55, 65  
 Setrawan 35  
 SKPD 35  
 solidaritas 9  
 sosialisasi 4  
 standar pelayanan minimum 34  
 sumber daya manusia 23  
 tata kelola 11, 60  
 Tata kelola 22  
 tata pemerintahan 15  
 tindakan afirmatif 9  
 tindakan kolektif 51  
 Tindakan kolektif 11  
 transparansi 6, 31  
 transparensi 57  
 Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) 34  
 UPK 21, 67  
 UU Desa tahun 1979 53

## Kepengarangan

Adam Satu 51  
 Adams, Paul 58  
 AKATIGA 32, 39  
 Akhmadi 12, 31  
 Ancilla Y. S. Irwan 26  
 Arya Gaduh 41  
 Asep Kurniawan 12  
 Azarbaijani-Moghaddam, Sippi 9  
 Bank Dunia 50  
 Barron, Patrick 42, 55  
 Beattie, Kevin 59  
 Burger, Nicholas 24  
 Dewi Ratna Sjari Manaf 32  
 Diprose, Rachel 55  
 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Kementerian Dalam Negeri (PMD-Kemendagri) dan  
 National Management Consultant (NMC) 65  
 Donny Setiawan 34  
 Early Dewi Nuriana 27  
 Edwar Fitri 27  
 Friedman, Jonathan 8  
 Glick, Peter 24  
 Grayman, Jesse Hession 18  
 Guggenheim, Scott 53, 60  
 Harmain Rahman 32  
 Hastuti 12  
 Holden, Donna Leigh 27  
 Holloh, Detlev 67  
 Hoppe, Michael 51  
 Humphreys, Macartan 42  
 Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) dan  
 PNPM Support Facility 23  
 Indriana Nugraheni 15  
 Jellema, Jon R 11  
 Johnsen, Steffen 19  
 Kartawijaya 12  
 Kulongoski, Ted E. 44  
 Leni Dharmawan 11, 15  
 McLaughlin, Karrie 13, 51  
 Meuthia Ganie-Rochman 27  
 Micro-Credit Ratings International Ltd (M-CRIL) 21  
 Monterio, Carolina 59  
 Morel, Adrian 43  
 Muhammad Syukri 12, 31  
 National Management Consultants dan Sekretariat  
 Program Pengembangan Kecamatan 57  
 Neate, Neil 25  
 Nelti Anggraini 18, 26  
 Nurlily Basri 59  
 Olken, Benjamin A. 20, 38, 45, 61  
 Onishi, Junko 20, 38  
 Paller, Laura 42  
 Papanek, Gustav F. 52  
 Perez-Arce, Francisco 24

PNPM Support Facility 10, 16, 17  
 PPK 49  
 Rabinovich, Lila 24  
 Rana, Yashodhara 24  
 RAND Labor and Population 37  
 Ratih Dewayanti 15  
 Rianingsih Djohani 35  
 Rima Irmayani 27  
 Risye Dwiyan 30  
 Scanlon, Megan McGlynn 26  
 Schuler, Nina 30  
 Siti Barokah 59  
 Siti Ruhanawati 18  
 Srinivasan, Sinduja 24  
 Suhirman 34, 35  
 Sulton Mawardi 31  
 Tasnim Yusuf 26  
 Tatag Wiranto 60  
 The PATTIRO Institute 33  
 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  
 (TNP2K) 6, 10, 15  
 Torrens, Anthony 56  
 Vivianti Rambe 19  
 Voss, John 29, 46  
 Watanabe, Makiko 43  
 Weinstein, Jeremy 42  
 Wetterberg, Anna 11  
 Wong, Susan 20, 38, 60, 62, 64  
 Woodhouse, Andrea 22, 66  
 Woolcock, Michael 54, 55  
 Wrobel, Robert 43  
 Yayasan MICRA 47  
 Yogana Prasta 60  
 Yoong, Joanne 24  
 Yulia Indrawati Sari 32

## Lokasi

Aceh 4, 5, 25, 33, 42, 43, 49, 59, 65  
 Bangka-Belitung 15  
 Banten 23  
 Bengkulu 19  
 DKI Jakarta 27  
 Gorontalo 13, 44  
 Jambi 11, 35  
 Jawa Barat 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 35, 37, 38, 39, 67  
 Jawa Tengah 11, 12, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 34, 35,  
 37, 41, 47, 51  
 Jawa Timur 17, 18, 22, 24, 31, 37, 45, 47, 55, 56, 59  
 Kalimantan Barat 25, 27, 33, 39, 41  
 Kalimantan Selatan 15, 26, 30, 35, 51, 59  
 Kalimantan Tengah 65  
 Lampung 25, 41, 59, 67  
 Maluku 10, 25, 33, 44, 65  
 Maluku Utara 10, 25, 33, 44, 65  
 Nusa Tenggara Barat 12, 13, 15, 27, 34, 39

Nusa Tenggara Timur 9, 10, 11, 13, 18, 21, 25, 26, 33, 34,  
 35, 38, 41, 44, 47, 55, 56, 59  
 Papua 8, 10, 25, 32, 39, 44, 65  
 Riau 44  
 Sulawesi Barat 25, 44  
 Sulawesi Selatan 9, 12, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 37, 39, 41, 44,  
 47, 56  
 Sulawesi Tengah 15, 33, 44, 65  
 Sulawesi Tenggara 19, 30, 31, 34, 44, 45  
 Sulawesi Utara 19, 25, 44, 51  
 Sumatra Barat 9, 21, 31, 39, 59  
 Sumatra Selatan 51  
 Sumatra Utara 17, 19, 24, 37, 45, 56, 59  
 Yogyakarta 17, 21, 24, 27, 35, 37, 67

## Program

ACCESS 13, 50  
 AIPMNH 13  
 BKPG 4, 5, 25  
 BLT 17, 24, 31  
 BRA-KDP 42, 43  
 Community-Based Reintegration Assistance for Conflict  
 Victims program. *lihat* Program: BRA-KDP  
 Dana Pinjaman Bergulir 21  
 Generas. *lihat* Program: PNPM Generasi  
 Jamkesmas 17, 24, 31  
 Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project.  
*lihat* Program: NUSSP  
 NUSSP 50  
 P2DTK 33  
 P2KP 47, 50, 52  
 P2SPP 35  
 P3BM 34  
 PEKKA 5  
 PNPM Generasi 8, 13, 14, 18, 20, 25, 38  
 PNPM Green 19, 25  
 PNPM Integrasi 35. *Lihat* Program: P2SPP  
 PNPM Mandiri 1, 6, 7, 25, 50  
 PNPM Peduli 8, 27, 28  
 PNPM Perdesaan 8, 9, 10, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29,  
 31, 39, 41, 44, 50, 52, 53  
 PNPM Perkotaan 15, 16, 17, 21, 24, 30, 37, 50, 52  
 PNPM RESPEK 8, 32  
 PNPM Rural 22, 29, 31, 40. *lihat* Program: PNPM  
 Perdesaan  
 PNPM Urban 37. *lihat* Program: PNPM Perkotaan  
 PPK 1, 8, 11, 23, 26, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53,  
 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67  
 Program Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat Miskin  
 Fase 2. *lihat* Program: WSLIC-2  
 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 1  
 Program Pembangunan Sistem Perencanaan Partisipatif.  
*lihat* Program: P2SPP  
 Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga.  
*lihat* Program: PEKKA

Program Pengembangan Kecamatan. *lihat* Program: PPK  
Pro-Poor Planning, Budgeting and Monitoring Program.  
*lihat* Program: P3BM  
Raskin 17, 24, 31  
RESPEK. *lihat* Program: PNPM RESPEK  
RLF. *lihat* Program: Dana Pinjaman Bergulir  
SPADA 25, 33  
Support for Poor and Disadvantaged Areas. *lihat* Program:  
SPADA  
UPP. *lihat* Program: PNPM Perkotaan  
Urban Poverty Program. *lihat* Program: PNPM Perkotaan  
Water Supply & Sanitation for Low Income Communities  
Phase 2. *lihat* Program: WSLIC-2  
Women Headed Household Empowerment. *lihat* Program:  
PEKKA  
WSLIC-2 50

## GLOSARIUM

ACCESS	<i>Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme</i>
ADD	Anggaran Dana Desa
AIPMNH	<i>Australian-Indonesian Partnership on Maternal and Neo-natal Health</i>
APBD	Anggaran Pengeluaran dan Belanja
ARLS	<i>Aceh Reintegration Livelihood Surveys</i> atau Survei Penghidupan dan Reintegrasi Aceh
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKAD	Badan Kerjasama Antar Desa
BKM	Badan Keswadayaan Masyarakat
BKPG	PNPM Mandiri Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPR	Badan Perkreditan Rakyat
BP-UPK	Badan Pengawas-Unit Pengelolaan Keuangan
BRA-KDP	<i>Community-Based Reintegration Assistance for Conflict Victims Program</i>
BUMDES	Badan Usaha Milik Desa
CSOs	<i>Civil Society Organizations</i> atau Organisasi Sosial Masyarakat (OMS)
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EIRR	<i>Economic Internal Rate of Return</i>
<i>Elite capture</i>	dominasi elit
FK	Fasilitator Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan
IDP	<i>Internally displaced people</i> atau pengungsi domestik
IFLS	<i>Indonesian Family Life Survey</i> atau Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI)
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
JPS	Jaringan Pengamanan Sosial
KDP	Kecamatan Development Program atau Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
LKM	Lembaga Keswadayaan Masyarakat
LLI	Local Level Institution atau Lembaga Tingkat Lokal
LSM	Lembaga Sosial Masyarakat
MAD	Musyawarah Antar Desa
M-CRIL	<i>Micro-Credit Ratings International Ltd.</i>
MDG	<i>Millenium Development Goals</i> atau Tujuan Pembangunan Milenium
MFI	<i>Microfinance institutions</i> atau lembaga kredit mikro
MHP-ROI	<i>Micro-Hydropower – Return on Investment</i>
MIS	<i>Management Information System</i>
Musrenbangdes	Musyawarah perencanaan pembangunan desa
ND	<i>Neighborhood Development</i> atau Pengembangan Lingkungan Pemukiman
NGOs	<i>Non-Governmental Organizations</i> atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)
NMC	<i>National Management Consultants</i>
NUSSP	<i>Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project</i> atau Program Perbaikan Kualitas Lingkungan Permukiman
OMS	Organisasi Sosial Masyarakat

PNPM Integrasi	Program Pembangunan Sistem Perencanaan Partisipatif (P2SPP)
P2SPP	Program Pembangunan Sistem Perencanaan Partisipatif (PNPM Integrasi)
P3BM	<i>Pro-Poor Planning, Budgeting and Monitoring</i>
PAR	<i>Portfolio at risk</i>
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PEKKA	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
PKK	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PNPM Mandiri	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
PNPM Perdesaan	PNPM Mandiri Perdesaan
PNPM Perkotaan	PNPM Mandiri Perkotaan
PNPM Generasi	PNPM Mandiri Generasi Sehat dan Cerdas
PNPM RESPEK	PNPM Mandiri Rencana Strategis Pembangunan Kampung
PNPM Rural	PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM Perdesaan
PNPM Urban	PNPM Mandiri Perkotaan atau PNPM Perkotaan
PODES	Potensi Desa
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PP	Peraturan Pemerintah
PPK	Program Pengembangan Kecamatan
PSF	<i>PNPM Support Facility</i>
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Raskin	Beras Miskin
RCT	<i>Randomized Controlled Trial</i> atau eksperimen acak terkontrol atau uji acak terkontrol
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RLF	<i>Revolving Loan Funds</i> atau dana pinjaman bergulir
RW	Rukun Warga
Setrawan	petugas publik yang bertugas mempromosikan pemberdayaan masyarakat
SAKERTI	Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPADA	<i>Support for Poor and Disadvantaged Areas Project</i> atau PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus
Spillovers	Dampak pengiring
SSN	<i>Social Safety Net</i> atau Jaringan Pengamanan Sosial (JPS)
SUSENAS	Survei Sosial-Ekonomi Nasional
TK	Taman Kanak-kanak
TPK	Tim Pengelola Kegiatan
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
UPK	Unit Pelaksana Kegiatan
UPK	Unit Pengelolaan Keuangan
UPP	<i>Urban Poverty Program</i> atau PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-Perkotaan)
UU Desa	Undang-Undang tentang Desa
WSLIC-2	<i>Water Supply &amp; Sanitation for Low Income Communities Phase 2</i> atau Program Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat Miskin Fase 2







Australian Government  
Department of Foreign Affairs and Trade



Kingdom of the Netherlands



UKaid  
from the Department for  
International Development



THE WORLD BANK  
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP